

**DISKRIMINASI SISTEM PEMBAGIAN BERAS RASKIN DI DESA
WALANDO GU KABUPATEN BUTON TENGAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

oleh

**Norma
10538278613**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Norma, NIM 10538278613** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 010 Tahun 1439 H/ 2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.

19 Jumadil Awal 1439 H
Makassar, -----
05 Februari 2018 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Penguji :

1. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
2. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd.
3. Dra. Hj. Syahribulan K. M.Pd.
4. Dra. Hj. Rahmiah Badaruddin, M.Si.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Diskriminasi Sistem Pembagian Beras Raskin (Raskin) di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

Nama : Norma

Nim : 10538278613

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggung jawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Februari 2018

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.


Suardi, S.Pd., M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NBM: 860 934


Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norma

Nim : 10538278613

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : Diskriminasi Sistem Pembagian Beras Raskin Di Desa Walando
Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Desember 2017

Yang Membuat Pernyataan

Norma



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norma

Nim : 10538278613

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikianlah perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Desember 2017

Yang Membuat Perjanjian

Norma

Mengetahui

Ketua Program Studi

Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si
NBM. 951 829

MOTTO

Jangan pernah takut untuk mencoba

Dan jangan pernah takut untuk gagal

Karena mencoba dan gagal adalah

Kunci dari semangat dan menuju ke suksesan

***Dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan karya sederhana ini
kepada Ayah dan Ibu atas segala doa dan
kasih sayang yang dicurahkan oleh beliau.
Keluarga dan sahabat-sahabatku yang senantiasa
berdoa serta membantu dengan tulus dan
ikhlas baik moril maupun material untuk kesuksesan penulis***

ABSTRAK

Norma 2017 *Diskriminasi Sistem Pembagian Beras Raskin Di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah*, Skripsi. Program studi pendidikan sosiologi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah makassar pembimbing Erwin Akib sebagai pembimbing I dan Suardi pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah: (i) untuk mengetahui proses pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah (ii) untuk mengetahui bentuk diskriminasi pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah (iii) untuk mengetahui kendala pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

Penelitian ini dilakukan di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan memahami realitas sosial tentang diskriminasi sistem pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. Informasi ditentukan secara qouta sampling, berdasarkan karakteristik informan yang telah ditetapkan yaitu kepala desa, staf pekerja, pemerintah dan masyarakat Desa Walando. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data melalui beberapa sumber yaitu reduksi data, menyajikan dan menarik kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan kepercayaan kebergantungan dan kepastian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi sistem pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah yaitu sebenarnya masyarakat tidak tau tentang diskriminasi sistem pembagian beras raskin karena sebagian masyarakat miskin tidak tau proses pembagian beras raskin yang sebenarnya karena sebagian masyarakat yang di undang untuk rapat musyawara proses peembagian beras raskin, bentuk diskriminasi pembagian beras raskin yaitu beras yang diterima masyarakat ada yang bagus dan tidak bagus, pembagiannya tidak merata Kepala Desa dan Staf Pekerja menyembunyikan beras tersebut sebagian di dalam gudang, setelah selesai pembagian beras kepala desa dan staf pekerja mengambil beras untuk pribadi dan kembali memperjual belikan kepada masyarakat kaya secara diam-diam agar tidak diketahui oleh masyarakat miskin, kendala pembagian beras raskin pemerintah di desa walando masih menggunakan data tahun 2009 sehingga terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat yang berhak menerima beras raskin dan yang tidak berhak menerima beras raskin.

Kata Kunci : *realitas sosial, sikap diskriminatif, sistem tatanan sosial.*

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang lebih indah penulis ucapkan selain Alhamdulillahirabbil Alamin sebagai kesyukuran kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya yang telah menganugerahkan kehidupan dan kemampuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salam dan Shlawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang panutan sejati.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat ujian meja guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini yang berjudul “Diskriminasi Sistem Pembagian Beras Raskin Di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah”, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekihlasan. Karenanya, penulis berharap kritikan yang bersifat konstruktif demi kelengkapan penyusunan skripsi ini.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua La duma dan Wa nihamu yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Tak lupa pula, dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada : Ayahhanda Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd., Ph.D, Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Nursalam, M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan

Sosiologi, Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan petunjuk serta koreksi dalam penyusunan skripsi, sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, Suardi, S.Pd., M.Pd. Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dan berbagi ilmu serta mengarahkan dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Bapak Musidi selaku kepala desa walando yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman dan sahabat-sahabatku terkasih serta seluruh rekan mahasiswa jurusan pendidikan sosiologi atas segala kebersamaan, motivasi, saran, dan bantuannya kepada penulis yang telah memberi harap dalam hidupku.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengharap kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Terutama bagi diri pribadi. Amin.

Makassar, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
SURAT PERJANJIAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Diskriminasi	11
B. Pengertian sistem.....	16
C. Pengertian program beras untuk rumah tangga miskin	16
D. Kelas Sosial, Kesadaran Kelas dan Perubahan Sosial	21
E. Perlindungan sosial.....	22
F. Pengertian kemiskinan.....	23
G. Kajian teori	29
H. Kerangka konsep	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35

	B. Lokasi Penelitian	35
	C. Informan Penelitian	36
	D. Fokus Penelitian	37
	E. Instrumen Penelitian	37
	F. Jenis dan Sumber Data Penelitian	37
	G. Teknik Pengumpulan data	38
	H. Teknik Analisis Data	39
	I. Teknik Keabsahan Data.....	41
BAB IV	GAMBAR DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN	44
	A. Sejarah Lokasi Penelitian	44
	B. Gambar Geografis	46
	C. Suku Adat Dan Budaya	48
	D. Lembaga Kemasyarakatan.....	51
	E. Sistem Perekonomian	51
	F. Sistem Kepercayaan	52
	G. Pendidikan masyarakat.....	53
BAB V	PROSES PEMBAGIAN BERAS RASKIN DI DESA WALANDO KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH.....	55
	A. Proses Pembagian Beras Raskin	55
	B. Hasil Penelitian	56
	C. Penjabaran Hasil Penelitian.....	59
	D. Kaitan dengan Teori.....	60
BAB VI	BENTUK DISKRIMINASI PEMBAGIAN BERAS RASKIN DI DESA WALANDO KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH	62
	A. Diskriminasi Sistem Pembagian Beras Raskin	62
	B. Penjabaran Hasil Penelitian.....	66
	C. Kaitannya Dengan Teori	67
BAB VII	KENDALA PEMBAGIAN BERAS RASKIN DI DESA WALANDO KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH	70
	A. Kendala dalam Pembagian Beras Raskin	70

B. Hasil Penelitian	71
C. Kaitan dengan teori sistem-sistem	73
BAB VIII PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Keluarga Miskin di Desa Walando.....	27
II.2 Data Penerimaan Beras Raskin	28
IV.1 Geografis Desa Walando	46
IV.2 Lembaga Kemasyarakatan	51
IV.3 Pendidikan Masyarakat.....	53
V.1 Data Dusun Pembagian Beras Raskin di Desa Walando	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir.....	34
IV.1 Peta Buton Tengah.....	47
V.1 Program Pembagian Beras Raskin di Desa Walando.....	55
VI.1 Bentuk Diskriminasi Pembagian Beras Raskin	62
VI.2 Terdapat Sisa Beras Rakin di dalam Gudang	66
VII.1 Kendala Pembagian Beras	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak maupun fisiknya dalam kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan di tetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonomisnya sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas (Soerjono Soekanto 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kemiskinan adalah masalah sosial laten yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga

merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Jika suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan material dari pada kehormatan, misalnya maka mereka yang mempunyai kekayaan material akan menempati kedudukan yang lebih tinggi. Apabila dibandingkan dengan pihak lain, gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan pembedaan seseorang atau sekelompok orang dalam kedudukan yang berbeda secara vertikal.

Menurut Lukman 2013, diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia hasil penelitian yang relevan menunjukkan bahwa diskriminasi masih merupakan masalah aktual, hal ini seharusnya tidak terjadi lagi, karena dalam masa reformasi ini telah diadakan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta oleh pemerintah-pemerintah sejak masa presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono telah dikeluarkan beberapa Inpres yang menghapuskan peraturan-peraturan pemerintah sebelumnya khususnya orde baru yang bersifat diskriminatif terhadap kebudayaan minoritas di tanah air. Mengapa hal demikian dapat terjadi terus seakan-akan rakyat kita sudah tak patuh lagi dengan hukum yang berlaku di negara kita. Untuk menjawab ini, tidak mudah karena penyebabnya cukup rumit, sehingga harus ditinjau dari beberapa unsur kebudayaan, seperti politik dan ekonomi, juga psikologi.

Menurut Saripati (2014), “persepsi penerima raskin di dalam menerima bantuan raskin” penelitian ini mengkaji bagaimana guna meningkatkan

pembangunan yang ada di Indonesia dalam penelitian ini, penelitian menggunakan nilai inti dari pembangunan yaitu harga diri (*self-esteem*), kecukupan (*sustenance*), serta kebebasan (*freedom*) untuk menilai kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti salah satu desa yang menjadi sasaran pemberian raskin, yaitu desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

Menurut Ekoman Suryadi (2016:5), “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Tahun 2015 Di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu” Penelitian ini didasarkan pada teori George Edward III, dimana menurut Edward III dalam teori implementasinya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh 4 aspek yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Pringsewu Barat Tahun 2015 belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan indikator keberhasilan raskin 5T yakni tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan waktu belum sepenuhnya tercapai.

Menurut Winria Pitapurwati (2014:2), “Pelaksanaan Penyaluran raskin di Kecamatan Sumorong Kabupaten Mamasa” hasil penelitian ini menjelaskan pencapaian indikator 6 tepat (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi) dalam melaksanakan penyaluran raskin di Kecamatan Sumorong Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator 6T dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di kecamatan Sumorong Kabupaten Mamasa belum sepenuhnya tercapai secara maksimal disebabkan oleh

ke tidak akuratan data rumah tangga sasaran penerima raskin dan rendahnya pengetahuan akan prosedur serta tujuan pelaksanaan penyaluran raskin baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksanaan penyaluran raskin.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut saya program beras raskin adalah bantuan dari pemerintah yang berupa subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Sedangkan diskriminasi adalah suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat luas, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan satu dengan yang lain.

Menurut Kemenko kesra, 2013 istilah raskin yang populer di Indonesia, terutama bagi masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah. Raskin merupakan sebutan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah yang di kenal dengan nama rumah tangga yang sangat miskin (RTSM) di Indonesia secara histeris, program raskin diawali tahun 1988 dalam bentuk operasi pasar khusus dalam rangka respon situasi krisis pangan saat itu. Sejak tahun 2002, program ini dikenal dengan nama program subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan tahun 2014 dikenal dengan nama program raskin (Kemenko kesra, 2014).

Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras (kemenko kesra, 2014) dengan upayah ini ditempu dengan penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak kg/RTS/bulan atau setara 180 kg/RTS/tahun dengan harga Rp 1.600 kg dalam (kemenko kesra, 2013). Rumah tangga sasaran penerima

manfaat (RTS-PM) yang berhak yang menerima raskin adalah rumah tangga yang terdaftar dalam basis data terpadu untuk program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang dikelola oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) (kemenko kesra, 2013). Hingga tahun 2015 sarannya mencapai 15.530.897 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelaksanaan koordinir oleh menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat (menko kesra) dengan membentuk tim koordinasi raskin pusat dan daerah. Sejak tahun 2013 kementerian sosial melalui direktorat jenderal pemberdayaan sosial dan penanggulangan sosial dan kemiskinan (Ditjen Dayasos dan Gulkin) bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

Menurut Kiswanti (2013) mengungkapkan tujuh permasalahan program raskin yang terdiri dari (1) akurasi data rumah tangga sasaran masih sering diperdebatkan di daerah. (2) *Data by name by address* rumah tangga sasaran hasil pendataan TNP2K tidak sesuai dengan data lapangan, (3) ketepatan indikator dan ketersediaan anggaran masih terbatas, (4) anggaran yang tersedia dalam APBN tidak sesuai dengan jumlah data rumah tangga sasaran yang ada di lapangan, (5) hambatan geografis/alam di beberapa daerah yang sulit (laut/danau/sungai) tidak didukung oleh sarana dan prasarana angkutan dan infrastruktur, (6) kondisi cuaca yang sangat ekstrim di beberapa daerah menjadi hambatan pendistribusian untuk tepat waktu, (7) efektivitas penyaluran raskin sangat tergantung kebijakan dan kemampuan pemerintah daerah, terutama untuk distribusi raskin ke rumah tangga sasaran.

Senada dengan pendapat di atas, komisi pemberantasan korupsi (KPK) (2014) mengungkapkan temuannya bahwa kelemahan program raskin terdapat pada tiga aspek, yaitu (1) aspek pelaksanaan, (2) aspek kelembagaan dan (3) aspek pengawasan dan pengendalian. Pada aspek pelaksanaan diungkapkan bahwa pembagian raskin tidak tepat sasaran, pemahaman para pelaku di lapangan tentang jumlah, kualitas, waktu penerimaan dan harga raskin tidak tepat, kualitas raskin memberikan insentif bagi perburuan rente. Pada aspek kelembagaan raskin masih lemah. Pada aspek pengawasan dan pengendalian diungkapkan lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam menjamin enam tepat (6T) yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Tidak efektifnya mekanisme pengaduan dan tidak lanjutnya.

Berbagai temuan ini mengindikasikan kelemahan program raskin sebagai bagian dari program perlindungan sosial di Indonesia. Sejalan dengan hal ini, tulisan ini dimaksudkan untuk merumuskan kembali design program raskin sebagai program perlindungan sosial. Proses perumusan dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai hasil penelitian tentang program raskin.

Masalahnya adalah bahwa diskriminasi sistem pembagian beras raskin yang tidak merata di Desa Walando tidak sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya tujuan utama raskin yang telah dijelaskan di atas yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Alasan berikutnya adalah tidak terlaksananya distribusi raskin dengan jumlah yang telah ditentukan dalam pedoman umum raskin yaitu 15 liter/RTS/bulan sehingga beras yang diterima oleh

masyarakat miskin menjadi berkurang dan berarti hak yang diterimanya juga berkurang.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah jumlah kepala keluarga sebanyak 85 kepala keluarga, yang menerima beras raskin 60 kepala keluarga. Adapun bentuk pembagian beras raskin yaitu dengan pembagian beras perliter, setiap liter dihargai Rp.2000. Setiap kepala keluarga maksimal membeli beras raskin sebanyak 15 liter, dan ada juga kepala keluarga yang mampu/kaya menerima beras raskin sehingga masyarakat miskin harus berbagi beras raskin dengan masyarakat yang mampu/kaya sehingga terjadilah diskriminasi sistem pembagian beras raskin tidak merata karena staf pekerja di balai desa walando tidak memperhatikan kepala keluarga miskin dan kepala keluarga mampu/kaya yang menerima beras raskin.

Masyarakat yang berhak menerima beras raskin yaitu jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas, Aspek pendidikan (keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 10-13 tahun), Aspek pangan (seluruh anggota keluarga tidak mampu makan nasi minimal dua kali sehari dan di ganti makanan ubi, jagung). Aspek sandang (lebih dari sebagian anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal sepuluh stel), Aspek papan (tempat tinggal/ rumah berlantai tanah/ berdinding bambu), Aspek kesehatan (bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar), Aspek kekayaan jumlah kekayaan/aset milik keluarga, Aspek air (tidak menggunakan air PAM. untuk keperluan makan dan minum), Aspek listrik (tidak menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga),

Jumlah anggota/ jiwa dalam kepala keluarga (termasuk kepala keluarga) 5 jiwa atau lebih.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik memilih judul proposal yaitu “Diskriminasi Sistem Pembagian Beras Raskin Di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang cukup relevan untuk dibahas adalah

1. Bagaimana proses pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah?
2. Bagaimana bentuk diskriminasi pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah?
3. Bagaimana kendala pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui diskriminasi pembagian beras raskin di Desa Walando Kabupaten Buton Tengah yang tidak tercapai dalam kebutuhan pangannya.
2. Untuk mengetahui bentuk diskriminasi pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

3. Untuk mengetahui kendala dalam pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah di atas maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
 1. Dapat memberikan mafaat yang sangat berharga berupa pengalaman praktis dalam hal penelitian.
 2. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan ketengah-tengah masyarakat.
- b. Manfaat praktisi
 1. Manfaat bagi masyarakat
 - a. Dengan adanya beras raskin pemerintah sudah membantu masyarakat miskin di Desa Walando Kabupaten Buton Tengah untuk kebutuhan pangannya.

E. Definisi Operasional

1. Diskriminasi adalah suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain.
2. Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerja sama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki

keterikatan pada rencana atau *plane* yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.

3. Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Diskriminasi

Secara bahasa diskriminasi berasal dari bahasa Inggris “Discriminate” berarti membedakan. Dan dalam bahasa Arab istilah diskriminasi dikenal dengan *al-muhabbah* yang artinya membedakan kasih. Kosakata bahasa Indonesia diskriminasi yaitu suatu sikap yang membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan lain sebagainya (Lukman 2013). Kesimpulannya yaitu diskriminasi merupakan suatu kejadian yang bisa dijumpai dalam masyarakat, disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain.

Menurut PBB, diskriminasi diartikan sebagai diskriminasi mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (Fajar Kurniawan 2017). Kesimpulannya adalah bahwa diskriminasi itu sifat sangat merugikan orang lain karena membeda-bedakan.

Menurut sudut pandang sosiologi, sampai kapanpun setiap menginginkan adanya kebersamaan, bersatu, dan terpadu, keinginan ini didasarkan pada prinsip:

1. Benar salah: apabila prinsip benar salah ini menjadikan seseorang tidak bisa sembarangan bertindak atau melakukan sesuatu sekehendak hatinya sendiri. Tindakan manusia yang dapat dibenarkan yang dilakukan seseorang sesuai dengan norma yang berlaku.

2. Pengungkapan perasaan ke bersamaan: pengungkapan perasaan ini terwujud dalam bentuk, seperti perkumpulan, kekerabatan, keluarga, suku, bangsa, organisasi, negara dan badan-badan internasional.
3. Keyakinan diri, dan keberadaan: perasaan keyakinan diri yang dimiliki oleh manusia mampu memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi dirinya, sehingga tidak menganggap unsur lain diluar dirinya sebagai sesuatu yang berbahaya, maupun ancaman yang perlu dihindari.
4. Pengungkapan estetika dan keindahan: manusia dalam hidupnya memerlukan kebutuhan batin atau kejiwaan manusia. Pengungkapan estetika adalah manifestasi kebutuhan batiniah sebagai makhluk berfikir dan bermoral (Anggeta Retty 2014). Kesimpulannya diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.
 - a. Jenis-jenis diskriminasi dibagi menjadi 2 yaitu:
 1. Diskriminasi langsung. Terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama.
 2. Diskriminasi tidak langsung. Terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. (Lukman 2013). Kesimpulannya adalah yang membahas tentang peraturan diskriminasi.

b. Macam-macam bentuk diskriminasi

1. Diskriminasi umur yaitu individu diberi layanan yang tidak adil karena tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Contohnya di negara malaysia remaja dianggap orang yang menimbulkan masalah sehingga timbul istilah masalah remaja.
2. Diskriminasi *gender* (jenis kelamin) yaitu individu diberi layanan yang tidak adil karena jenis kelamin mereka. Contoh seorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dengan lelaki sejawatnya meskipun pekerjaan mereka sama.
3. Diskriminasi kesehatan yaitu individu diberi layanan yang tidak adil karena mereka menderita penyakit atau kecacatan tertentu contohnya seorang yang pernah menderita sakit jiwa di tolak untuk mengisi jawatan tertentu, meskipun ia sudah sembuh dan memiliki kemampuan yang di perlukan.
4. Diskriminasi ras yaitu individu tidak di berikan layanan kesehatan karena ras mereka.
5. Diskriminasi agama yaitu individu diberi layanan yang tidak adil berdasarkan agama yang dianut olehnya. Kesimpulannya diskriminasi suatu masalah yang terjadi di masyarakat baik dikalangan remaja, *gender* kesehatan, ras, agama (Simanis 2017).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa macam-macam diskriminasi adalah suatu sikap yang ada di dalam diri manusia yang harus dihindari agar tidak ada perbedaan dan saling menghargai satu sama lain didalam masyarakat.

c. Penyebab timbulnya diskriminasi

1. Diskriminasi timbul akibat dari latar belakang sejarah.
2. Diskriminasi timbul akibat perkembangan sosial-kultural dan situasional.
3. Diskriminasi bersumber dari faktor kepribadian
4. Diskriminasi timbul akibat perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama (Rikimaulana 2013). Kesimpulannya penyebab timbulnya diskriminasi kurangnya saling menghargai satu sama lain dalam masyarakat.

d. Cara Menghindari Diskriminasi

Untuk menghindari sikap diskriminasi seseorang harus mempunyai sikap kebersamaan. Sikap ini memiliki tujuan tentang adanya kesetaraan, kesamaan, keseimbangan, keselarasan, serta penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Menempatkan kesejajaran antar sesama menghantarkan setiap orang memberikan yang terbaik pada ketaqwaan yang tinggi (Andika Putra 2014). Kesimpulannya adalah setiap manusia harus saling menghargai satu sama lain agar tercipta masyarakat yang penuh cinta damai.

e. Dampak Negatif Diskriminasi

Menurut Lukman 2013 sikap diskriminasi sangat bertentangan dengan ajaran islam, karena sikap diskriminasi menunjukkan martabat yang rendah bagi pelakunya dan akan memicu munculnya pelaku buruk lainnya yang dilarang, akibat dari sikap diskriminasi diantaranya adalah:

1. Memicu munculnya sektarianisme, agama islam melarang umatnya hanya mementingkan kesukuan atau kelompoknya.
2. Memunculkan permusuhan antar kelompok, perasaan melebihkan kelompok sendiri, dan merendahkan kelompok yang lain menjadi pemicu perseteruan antar kelompok.
3. Mengundang masalah sosial yang baru, karena secara sosial seseorang tidak disikapi secara wajar, akan sikap diskriminasi dapat memancing munculnya masalah sosial yang bertentangan dengan agama islam.
4. Menciptakan penindasan dan otoritarianisme dalam kehidupan, karena adanya perasaan lebih dan sentimen terhadap kelompok, sehingga hak-hak kelompok lain diabaikan. Kesimpulannya bahwa dalam ajaran agama islam pun dilarang bersikap diskriminasi karena memicu munculnya sektarianisme, Memunculkan permusuhan antar kelompok, Mengundang masalah sosial yang baru, dan lain-lain.

B. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Atau sekumpulan unsur/elemen yang saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, secara umum sistem adalah perangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (Arifashkaf 2013). Kesimpulannya bahwa sistem merupakan kumpulan jaringan kerja yang di gunakan seorang peneliti untuk meneliti.

Menurut Jogianto 2013 sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa Sistem ini menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Mnurut Sofwatul sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya (Sofwatul adyan 2014). Berdasarkan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa sistem adalah gabungan dari suatu unsur yang saling berkaitan satu sama lain.

C. Pengertian Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program raskin bersama program penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah

tangga. Selain itu program Raskin merupakan program tranfer energi dalam bentuk kalori yang dapat mendukung program lainya (Depdagri, 2009). Kesimpulannya raskin merupakan beras miskin yang diberikan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

1. Tujuan Dan Sasaran Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin)

Tujuan dan sasaran program beras untuk rakyat miskin (raskin) program raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Tujuan program raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan pangan pokok dalam bentuk beras (Jhoelk julham 2015). Dalam hal diatas dapat di simpulkan tujuan dan sasaran program raskin merupakan memberikan bantuan beras bersubsidi kepada keluarga miskin untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangannya dengan jumlah dan harga tertentu, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.

2. Distribusi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Titik distribusi adalah tempat di desa/kelurahan yang dapat dijangkau keluarga sasaran penerima manfaat atau jika lokasi desa sulit dijangkau dapat ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara pemuda dengan Diver/Sub Diver/kanlog sebagai tempat penyerahan beras oleh Satgas raskin kepada pelaksana distribusi. pelaksana distribusi adalah aparat desa/kelurahan yang dibantu oleh warga masyarakat setempat (kader KB, Tim Penentuan keluarga sasaran penerima manfaat adalah berdasarkan surat keputusan bupati/walikota tentang penetapan pagu raskin dan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah desa/kelurahan menggunakan data dasar keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. Musyawarah desa/kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan aparat desa/kelurahan, (termasuk kepala dusun/lingkungan, dukuh, RW, RT), PLKB anggota Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan, institusi kemasyarakatan desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga miskin. Keluarga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah desa/kelurahan yang dilampiri daftar keluarga sasaran penerima manfaat. (format Model DPM-1) dan ditandatangani kepala desa/lurah serta disahkan oleh camat setempat Penyaluran raskin diawali dari permintaan alokasi melalui surat permintaan alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. SP tersebut ditujukan kepada Kadivre/ Kasubdivre yang membawahi wilayah tersebut. Atas SPA tersebut, oleh Tim Koordinasi Raskin setempat dibahas jadwal penyalurannya

untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyiapkan waktu, tenaga dan dana pada saat penyaluran. Sebelum jadwal pengiriman beras ke titik distribusi, tim koordinasi raskin melakukan pengecekan kondisi beras raskin yang akan disalurkan. Beras raskin kemudian dikirimkan ke titik distribusi tujuan sesuai dengan jumlah RTS yang terdata di wilayah tersebut tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah oleh bulog (Ekoman suryadi 2016). Kesimpulannya distribusi beras miskin yaitu suatu tempat untuk pemberian raskin seperti desa, kelurahan, dusun dan kecamatan yang membutuhkan raskin.

Indikator kinerja pelaksanaan raskin adalah: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Pengerak PKK, Karang Taruna atau unsur masyarakat lain dan ditunjukkan oleh kepala desa/lurah (Depdagri, 2009).

- a. Tepat sasaran yaitu raskin hanya diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat.
- b. Tepat jumlah yaitu jumlah beras yang dibeli keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai hasil keputusan gubernur/bupati/walikota.
- c. Tepat harga yaitu harga beras yang dibayar oleh keluarga sasaran penerima manfaat sebesar Rp. 2.000/Kg netto di titik distribusi
- d. Tepat waktu yaitu waktu pelaksana distribusi beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi.

- e. Tepat administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
- f. Tepat kualitas yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas bisa di simpulkan bahwa kinerja pelaksanaan raskin harus tepat agar bisa membantu masyarakat miskin dalam kebutuhan pokoknya.

3. Perundang-undangan raskin

Berdasarkan peraturan perundangan raskin yang menjadi landasan pelaksanaan program raskin adalah:

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan umum bulog.
- d. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- e. Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;

f. Kepmenko Kesra No. 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi. Kesimpulannya yaitu suatu aturan yang ada di Indonesia dalam hal pembagian beras miskin.

D. Kelas Sosial, Kesadaran Kelas dan Perubahan Sosial

salah satu kontradiksi yang paling mendalam dan luas yang melekat dalam setiap masyarakat adalah adanya pembagian kerja dan pemilikan hak-hak pribadi. Pertentangan antara kepentingan-kepentingan material dalam kelas-kelas sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Menurut Marx pembagian kelas dalam masyarakat adalah pembagian antara kelas-kelas yang berbeda, faktor yang paling penting mempengaruhi gaya hidup dan kesadaran individu adalah posisi individu dalam kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Marx beranggapan bahwa pemilikan atau kontrol atas alat produksi merupakan dasar utama bagi kelas-kelas sosial dalam semua tipe masyarakat, dari masyarakat yang primitif sampai pada kapitalisme modern. Mengenai konsep kelas Marx, mengidentifikasi tiga kelas utama dalam masyarakat kapitalis, yaitu buruh upahan, kapitalis, dan pemilik tanah, meskipun secara umum pembagiannya hanya terbagi menjadi dua yaitu kelas berjuis dan kelas ploreter. Kelas tersebut dibedakan berdasarkan pendapatan pokok yakni upah, keuntungan, sewa tanah untuk masing-masingnya. Selanjutnya Marx juga melakukan pembedaan antara dimensi obyektif dan subyektif antara kepentingan kelas. Kesadaran kelas merupakan satu kesadaran subyektif akan

kepentingan kelas obyektif yang mereka miliki bersama orang-orang lain dalam posisi yang serupa dalam sistem produksi. Konsep 'kepentingan' mengacu pada sumber-sumber material (ekonomi) yang aktual yang diperlukan kelas untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan individu atau kelompok. Kurangnya kesadaran penuh akan kepentingan kelas sangat berhubungan dengan penerimaan kelas bawah yang berkembang untuk mendukung kelas dominan dan struktur sosial sistem kapitalis yang ada. Pengaruh ideologi inilah yang memunculkan 'kesadaran palsu' dari kelas bawah yaitu kelas buruh upahan atau kelas ploreter (Suardi 2016). Dari penjelasan di atas tentang kelas sosial, kesadaran kelas dan perubahan sosial. Kesimpulannya adalah di dalam kehidupan masyarakat terdapat kelas-kelas sosial ada kelas atas, menengah dan bawah, untuk itu masyarakat yang hidupnya di kelas atas kadang sewenang-wenang dengan masyarakat kelas bawah.

E. Perlindungan Sosial

United nations research institute for sosial development (Sitepu, 2014, h. 21) menjelaskan bahwa perlindungan sosial (*social protection*) terkait dengan pencegahan, pengelolaan dan mengatasi situasi yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Sementara Suharto (2009) bahwa perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi yang dilakukan untuk merespon beragam resiko kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Dua pendapat di atas secara substansial relatif sama, bahwa perlindungan sosial adalah upaya menangani resiko sosial bagi manusia, terutama bagi kelompok rentan. Hal ini juga sejalan dengan definisi perlindungan sosial berdasarkan pasal 1 undang-undang RI

Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentangan sosial. Kesimpulannya yaitu pemerintah membuat undang-undang untuk melindungi rakyat Indonesia.

F. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara etimologi berasal dari kata miskin yang mendapat imbuhan ‘ke-an” yang berarti mengubah gaya dari sifat kepada suatu keadaan (kata benda) kata miskin dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1995) berarti tidak berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan rendah. Definisi kemiskinan biasa dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, atau dilukiskan pada mereka yang berpenghasilan jauh dibawah mereka yang berpenghasilan lebih baik (Malik muqtadir 2016). Dengan demikian di simpulkan kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan yang serba kekurangan sebagai akibat tingkat pendapat yang rendah.

Pengertian kemiskinan secara sederhana selalu dikaitkan dengan rendahnya pendapat dan kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana diungkapkan oleh (Tadjudin Noer Effndi 2007) bahwa kemiskinan sekelompok orang yang dikaitkan pendapat dan kebutuhan, perkiraan kebutuhan hanya mengacu kepada kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Bila pendapatan seseorang atau keluarga tidak minimum maka orang dan keluarga itu dapat dikategorikan miskin. Kesimpulannya kemiskinan adalah suatu masyarakat tertentu yang penghasilannya rendah dan kebutuhan hidupnya kurang memuaskan untuk kebutuhan sehari-hari.

Kemiskinan yang menghinggapi manusia tentunya tidak datang dengan sendirinya, atau bahkan kemiskinan datang dari tuhan. Kemiskinan biasanya terjadi karena mereka tidak mempunyai keterampilan, taraf pendidikan yang rendah. Menurut (Ginanjari Kartasasmita 2008) sekurang-kurangnya ada empat hal penyebab kemiskinan.

1. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
2. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya fisik, daya fikir dan prakarsa.
3. Terbatasnya lapangan Kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan kerja. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan rantai kemiskinan itu.

Kondisi terisolasi. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerakan kemajuan yang dinikmati masyarakat lain. Keempat penyebab yang diuraikan di atas menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah perdesaan. Karena berpendidikan rendah produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan minimum antara lain

kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Akibat rumah tangga miskin menghasilkan keluarga-keluarga miskin pada generasi penerusnya. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pada umumnya terutama di daerah pedesaan memerlukan upaya-upaya agar kemiskinan itu dapat diselesaikan tugas dari pengentasan kemiskinan ini sebenarnya berada pada tangan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat mengurangi kemiskinan (Tadjudin Noer Effndi 2007).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan kemiskinan merupakan suatu masalah terjadi dimana saja baik di kota maupun penduduk desa untuk itu, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab tetapi masyarakat harus pintar-pintar menyediakan lapangan pekerjaan.

Satu hal yang tampak harus dipikirkan dalam penanggulangan kemiskinan adalah perlu memikirkan kebijakan yang dapat meningkatkan akses penduduk miskin untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya yang tersedia sehingga mereka dapat menciptakan peluang kerja serta mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara mandiri. Upaya yang perlu dilakukan pertama-tama adalah berusaha merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan akses mereka pada pengontrolan. sertaan dalam pengambilan keputusan tentang pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Selain itu perlu ada kebijakan relokasi dana yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, merangsang peningkatan pendapatan dan perluasan pelung kerja (RPJM

Nasional 2010-2014). Dari penjelasan diatas bisa di simpulkan upaya ini perlu dibarengi dengan kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja dengan menyediakan modal dan perbaikan-perbaiki organisasi atau institusi keuangan.

Upaya yang perlu dipikirkan adalah berusaha merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan akses mereka pada pengontrolan dan keikut sertaan dalam pengambilan keputusan tentang pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka. Artinya, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perlu ditingkatkan. Itu perlu diikuti pemberdayaan, baik secara politis, sosial maupun hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kemampuan masyarakat dan individu (*self-consciousness*) dengan meningkatkan kemampuan ekonomi dan meningkatkan kesadaran politik, sosial dan hukum dapat menimbulkan kesadaran tentang hak-hak politik, kesadaran sosial, dan hak-hak hukum. Selain itu, perlu adanya kebijakan relokasi dana yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi regional, merangsang peningkatan pendapatan, dan perluasan peluang kerja. Untuk mencapai sasaran itu perlu adanya upaya mendekatkan penduduk miskin pada akses dan pelayanan sarana keuangan (Ekoman suryadi 2016). Kesimpulannya upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kemampuan masyarakat dan individu.

No	ASPEK KEMISKINAN	INDIKATOR KEMISKINAN
1.	Aspek penyebab/aspek penghasilan	1. Jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas
2.	Aspek penentuan kemiskinan	1. Aspek pangan (seluruh anggota keluarga tidak mampu makan nasi minimal dua kali sehari dan di ganti makanan ubi, jagung dan kasuami). 2. Aspek sandang (lebih dari sebagian anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal sepuluh stel). 3. Aspek papan (tempat tinggal/ rumah berlantai tanah/ berdinding bambu/berataprumbia).
3.	Aspek pendukung kemiskinan	1. Aspek kesehatan (bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar). 2. Aspek pendidikan (keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 – 15 th). 3. Aspek kekayaan jumlah kekayaan/aset milik keluarga. 4. Aspek air (tidak menggunakan air PAM. untuk keperluan makan dan minum). 5. Aspek listrik (tidak menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga). 6. Jumlah anggota/ jiwa dalam kepala keluarga (termasuk kepala keluarga) 5 jiwa atau lebih.

Tabel II.1 Keluarga Miskin di Desa Walando

No	Nama	Beras	Liter	Harga
1.	La ara	Raskin perum bulog	15	30.000
2.	La ome	Raskin perum bulog	15	30.000
3.	La miu	Raskin perum bulog	13	26.000
4.	La madidu	Raskin perum bulog	15	30.000
5.	La kadu	Raskin perum bulog	14	28.000
6.	La hasini	Raskin perum bulog	15	30.000
7.	La imbo	Raskin perum bulog	13	26.000
8.	La nika	Raskin perum bulog	14	28.000
9.	La ima	Raskin perum bulog	15	30.000
10.	La adaa	Raskin perum bulog	15	30.000
11.	La ane	Raskin perum bulog	14	28.000
12.	La ampera	Raskin perum bulog	13	26.000
13.	La sani	Raskin perum bulog	15	30.000
14.	La baa	Raskin perum bulog	15	30.000
15.	La kamisi	Raskin perum bulog	15	30.000
16.	La parinta	Raskin perum bulog	15	30.000
17.	La hendi	Raskin perum bulog	14	28.000
18.	La dani	Raskin perum bulog	13	26.000
19.	La hendri	Raskin perum bulog	15	30.000
20.	La keu	Raskin perum bulog	15	30.000
21.	La kadiri	Raskin perum bulog	14	28.000
22.	La lili	Raskin perum bulog	13	26.000
23.	La suni	Raskin perum bulog	15	30.000
24.	La judi	Raskin perum bulog	13	26.000
25.	La sudi	Raskin perum bulog	14	28.000
26.	La midu	Raskin perum bulog	14	28.000
27.	La nani	Raskin perum bulog	15	30.000
28.	La imbo	Raskin perum bulog	15	30.000
29.	La sani	Raskin perum bulog	13	26.000
30.	La soni	Raskin perum bulog	15	30.000
31.	La tarigu	Raskin perum bulog	15	30.000
32.	La ili	Raskin perum bulog	13	26.000
34.	La sudi	Raskin perum bulog	14	28.000
35.	La udi	Raskin perum bulog	15	30.000
36.	La kamili	Raskin perum bulog	15	30.000
37.	La mane	Raskin perum bulog	15	30.000
38.	La kiki	Raskin perum bulog	15	30.000

39	La niu	Raskin perum bulog	14	28.000
40	La loci	Raskin perum bulog	14	28.000
41	La ical	Raskin perum bulog	13	26.000
42	La samsul	Raskin perum bulog	15	30.000
43	La kiau	Raskin perum bulog	15	30.000
44	La mane	Raskin perum bulog	13	26.000
45	La zuki	Raskin perum bulog	15	30.000
46	La amin	Raskin perum bulog	13	26.000
47	La parenta	Raskin perum bulog	14	28.000
48	La iki	Raskin perum bulog	15	30.000
49	La ilham	Raskin perum bulog	15	30.000
50	La aladin	Raskin perum bulog	13	26.000
51	La imi	Raskin perum bulog	14	28.000
52	La imbo	Raskin perum bulog	14	28.000
53	La isi	Raskin perum bulog	15	30.000
54	La bolosi	Raskin perum bulog	15	30.000
56	La keu	Raskin perum bulog	15	30.000
57	La uki	Raskin perum bulog	14	28.000
58	La rafil	Raskin perum bulog	14	28.000
59	La ini	Raskin perum bulog	15	30.000
60	La nurdin	Raskin perum bulog	13	26.000

Tabel II.2 Data Penerimaan Beras Raskin

G. Kajian Teori

a. Teori Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial menurut Max Weber adalah stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise. Dasar-dasar pembentukan peran sosial antara lain: (2012:460).

1. Ukuran kekayaan

Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem lapisan sosial, demikian pula sebaliknya, yang tidak mempunyai kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaian, maupun kebiasaan dalam berbelanja.

2. Ukuran kekuasaan dan wewenang

Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem lapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan.

3. Ukuran kehormatan

Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakat. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur.

4. Ukuran ilmu pengetahuan

Sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insiyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor.

Berdasarkan penjelasan di atas bawah Max Weber membagi tempat ukuran yaitu kekayaan, kekuasaan atau wewenang, kehormatan dan ilmu pengetahuan dapat dijelaskan mempunyai perang masing-masing dalam hal kehidupan manusia sehari-hari.

b. Teori Sistem-Sistem

Menurut Buckley yaitu apa yang harus diperoleh sosiologi dari teori sistem-sistem *pertama* karena teori sistem-sistem berasal dari ilmu pasti dan karena, setidaknya dimata para pendukungnya, dapat diterapkan kepada semua ilmu perilaku dan sosial, ia menjanjikan kosa kata umum untuk menggabungkan ilmu-ilmu itu. *Kedua* teori sistem-sistem bertingkat-tingkat dan dapat diterapkan sama baiknya kepada aspek-aspek dunia sosial pada skala terbesar dan skala terkecil, yang paling objektif dan paling subjektif. *Ketiga* teori sistem-sistem tertarik kepada aneka relasi aspek-aspek jamak dunia sosial sehingga bekerja melawan analisis dunia sosial yang sepotong-

sepotong (2012:560). Kesimpulan teori sistem merupakan ilmu pasti, kosa kata umum dan sistem bertingkat-tingkat dalam dunia pendidikan.

c. Teori Program Raskin

Program raskin sebenarnya didasarkan pada sistem pemerintahan negara Indonesia yang menganut *welfare state*. Negara yang menganut sistem dimaksud memegang prinsip yaitu negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat lewat penetapan kebijakan publik, namun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu campur tangan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan sosial ialah melalui bantuan pangan dalam bentuk beras bersubsidi. Ulasan singkat program raskin menunjuk bahwa program dimaksud memang ditetapkan dengan pendekatan atas ke-bawah (*top-down approach*). Hal itu jelas terlihat dimana para pembuat kebijakan menetapkan kebijakan publik pengentasan kemiskinan melalui pembentukan TNP2K sebagai lembaga perumus kebijakan bantuan sosial serta penunjukan perum Bulog sebagai agen distributor beras. Untuk melakukan PPLS Pembuat kebijakan memperhatikan informasi statistik dimana Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat konsumsi beras tertinggi di dunia yaitu sekitar 139 kg/tahun/jiwa. Asumsi lain adalah pemerintah memperkirakan rata-rata jumlah anggota keluarga adalah sebanyak 4 jiwa sesuai dengan program keluarga berencana nasional. Selain itu, adanya keputusan pemerintah bahwa subsidi beras dilakukan untuk stabilitas harga di mana harga beras di pasar untuk jenis beras yang sama lebih tinggi sekitar 70-80% dari pada harga beras bersubsidi.

Atas beberapa asumsi tersebut, pemerintah menetapkan jatah raskin sebanyak 15 kg/RTS/bulan (Trinugroho, Sutomo and Riani 2011). Kesimpulannya adalah pemerintah ikut serta dalam subsidi beras di pasar dan beras miskin untuk membantu masyarakat Indonesia.

H. Kerangka Konsep

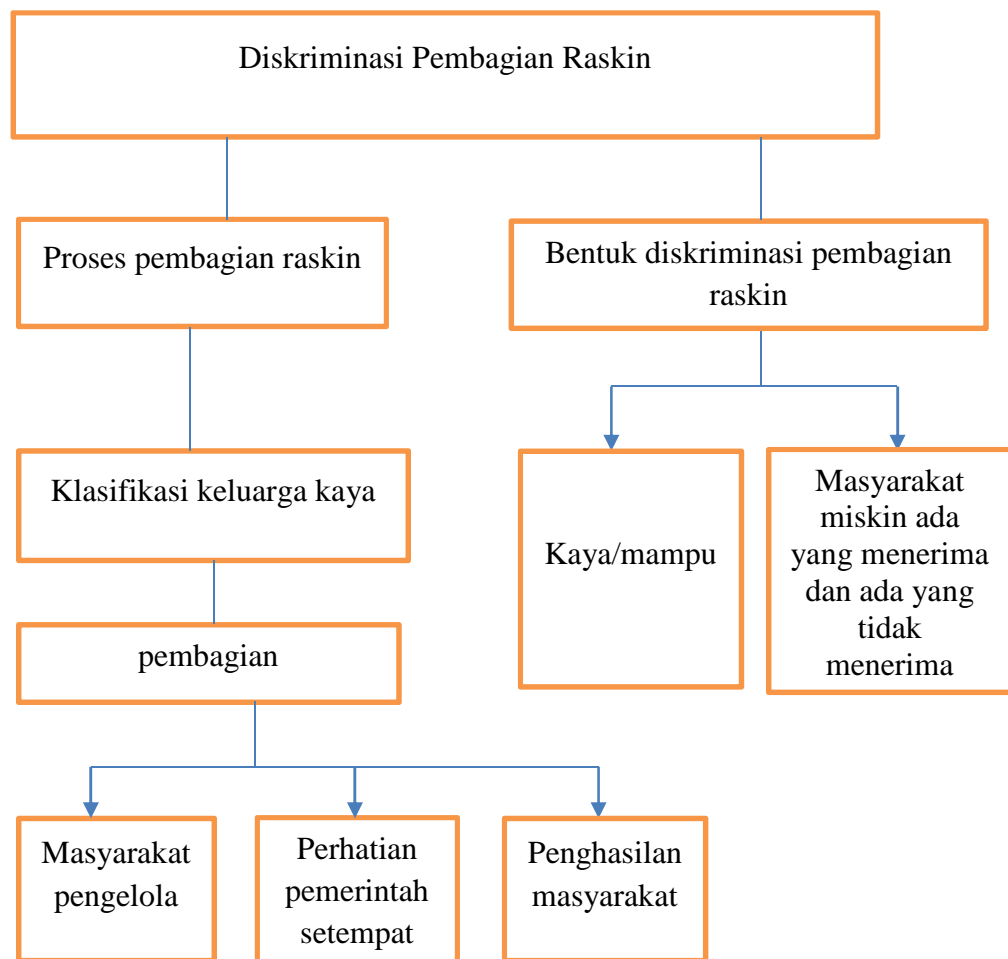
Kerangka konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2010). Kesimpulannya konsep atau catatan yang mau di teliti.

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin di teliti. Kemudian konsep tersebut harus di gambarkan ke dalam sub-sub tersebut (Arikunto, 2010).

Sistematika kerangka konsep menjelaskan tentang bagaimana diskriminasi sistem pembagian beras raskin dalama membantu masyarakat miskin untuk kebutuhan pangannya di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini akan di lakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang bagaimana diskriminasi sistem pembagian beras raskin yang tidak merata di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

Adapun cara pembagian beras miskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah yang menerima beras raskin 60 kepala keluarga. Berdasarkan bentuk pembagian raskin yaitu dengan pembagian beras perliter, setiap liter dihargai Rp.2000. Setiap kepala keluarga maksimal membeli beras

raskin sebanyak 15 liter. Pembagian raskin yang tidak merata dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan ketidak seimbangan kesejahteraan hidup masyarakat. Kepala Desa Walando atau staf pekerja harus melakukan survei mengenai beberapa banyak kepala keluarga yang memiliki ekonomi memadai dan tidak memadai. Harus menentukan mana warga yang berhak menerima pembagian raskin dan mana yang tidak menerima raskin.



Gambar II.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya di lapangan. Sedangkan menurut jenis datanya termasuk penelitian kualitatif. Metode penelitian ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk bisa memberikan keterangan yang jelas mengenai tentang diskriminasi sistem pembagian beras raskin yang tidak merata .

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis akan menentukan lokasi penelitian dilakukan di Diskriminasi Sistem Pembagian Beras Raskin Yang Tidak Merata Di Deas Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yang dituju dalam penelitian ini adalah individu/masyarakat yang berada di lingkungan balai desa walando. Penelitian

diharapkan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat walando terhadap diskriminasi sistem pembagian beras raskin yang tidak merata.

Informan penelitian merupakan sumber informasi yang diperlukan dalam penelitian, penentuan informan peneliti harus teliti dan disesuaikan dengan jenis data atau informasi yang ingin didapatkan. Teknik penentuan informasi yang digunakan dapat ditempuh dengan berbagai cara tergantung masalah penelitian yang akan di teliti penentuan sampel tersebut diantaranya: *Purposive Sampling* atau *Judgmental Sampling*, *Snow-Ball Sampling* (penarikan sampel secara bola salju), *Quota Sampling* (penarikan sampel secara jatah), *Accidental Sampling* atau *Convenience Sampling*. Suardi dkk (2015).

Informan penelitian dipilih secara *Purposive Sampling* atau *Judgmental Sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan informasi yang diketahui, dan untuk menambah subjek penelitian. Informasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informasi dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian yaitu pimpinan kepala desa di walando yang mempunyai peran penting didalam lingkungan di desa walando, tenaga kepala desa, staf-staf yang pekerja di balai desa walando dan masyarakat setempat.

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana peran kepala desa dan staf-staf pekerja di balai desa dalam pembagian beras raskin kepada masyarakat miskin yang tidak merata di desa Walando Kabupaten Buton Tengah.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa item seperti kamera, alat perekam, lembar observasi dan lain-lain untuk keperluan dalam penelitian agar lebih jelas dan akurat, selain itu peneliti juga melakukan penelitian tersendiri seperti mencari informasi atau data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

F. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara atau observasi sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai dan mengobservasi langsung beberapa staf-staf pekerja, pimpinan kepala desa di desa Walando dan masyarakat yang ada di desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. Serta mengambil beberapa referensi buku dan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendataan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Penelitian ini lebih bersifat antropologis, oleh karenanya dalam mengumpulkan data digunakan metode pengamatan dan keterlibatan langsung di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal dari seseorang atau sekumpulan orang secara lisan dan langsung. Wawancara dapat dilakukan secara tidak tersusun dan secara tersusun.

Wawancara ini juga dilakukan dalam pengumpulan data. Penulis melaksanakan wawancara dengan cara berdialog atau bertanya secara langsung dengan melibatkan beberapa staf pekerja, Pimpinan kepala desa dan Masyarakat yang berkepentingan langsung terhadap permasalahan tentang pembagian beras raskin yang tidak merata Kabupaten Buton Tengah sebagai informan kunci. Dalam wawancara ini penulis melakukannya secara terencana. Wawancara yang penulis lakukan bertujuan untuk mendapatkan beragam keterangan dengan cara mengajukan beragam pertanyaan, sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pikiran peristiwa itu, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data dokumentasi balai desa dengan tujuan dapat membantu mengetahui sebab dan bentuk permasalahan yang ada di balai desa tersebut.

4. Partisipatif

Partisipatif adalah keterlibatan peserta secara mental dan emosional dan fisik dalam menanggapi melaksanakan kegiatan dalam proses pembelajaran dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan mengambil tanggung jawab atas keterlibatannya.

H. Analisi Data

data merupakan proses pengelolaan data penelitian. Dalam penelitian Analisis kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), menurut Sugiono 2009, di dalamnya terdapat proses diantaranya:

1. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga

dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Display data merupakan penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis dan teori.

a) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi, di mana pendekatan ini merupakan disiplin sosial, khususnya lingkungan masyarakat dan lingkungan di balai desa kepada masyarakat miskin dalam pembagian beras raskin untuk memenuhi kebutuhan pangannya membentuk perilaku yang dilakukan staf pekerja saat pembagian beras raskin kepada masyarakat miskin.

Suatu tinjauan sosiologis berarti sorotan yang didasarkan pada hubungan antarmanusia, hubungan antar kelompok, dan di dalam proses kehidupan bermasyarakat. Di dalam pola hubungan-hubungan tersebut yang lazim disebut interaksi sosial anak dan remaja merupakan salah satu pihak, di samping adanya pihak-pihak lain. Pihak-pihak tersebut saling memengaruhi,

sehingga terbentuklah kepribadian-kepribadian tertentu sebagai akibatnya.

b) Metode Berfikir

Metode berfikir dalam penelitian ini adalah metode berfikir Induktif. Metode berfikir induktif merupakan proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju ke suatu teori, atau mengorganisasi fakta-fakta atau data-data yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian yang berhubungan. Penarikan kesimpulan berdasarkan pada fakta-fakta khusus di tarik menjadi generalisasi.

I. Teknik Keabsahan Data

Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yin (2007) mengajukan empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah Sebagai berikut :

1. Keabsahan Konstruk (*Construct validity*)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang berukuran benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton (dalam Sulistiany 1999) ada 4 macam triangulasi Sebagai tehnik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

a. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

2. Keabsahan Internal (*Internal validity*)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan

interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.

3. Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

4. Keajegan (*Reabilitas*)

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi.

Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

Kabupaten Buton Tengah atau disingkat Buteng merupakan salah satu Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu kotanya berada di Kendari, Kecamatan Lakudo. Buton Tengah merupakan hasil pemekaran dari Buton yang disahkan pada pertengahan tahun 2014 bersama Kabupaten Buton Selatan Dan Kabupaten Muna Barat. Ketiga daerah otonomi baru tersebut disahkan menjelang akhir kepengurusan DPR RI periode 2009-2014. Salah satu alasan pemekaran wilayah ini adalah karena permasalahan akses. Seluruh wilayah Buton Tengah tidak berada di pulau Buton, sedangkan ibukota Kabupaten Buton berada di pasarwajo. Pelayanan dan kontrol membutuhkan biaya dan waktu yang panjang karena harus melewati laut menuju Kota Baubau, lalu dilanjutkan perjalanan darat menuju Pasarwajo di ujung Timur Pulau Buton.

Daerah Buton Tengah merupakan bekas wilayah Kerajaan dan Kesultanan Buton yang telah eksis sejak zaman dulu. Pada masa pemerintahan raja buton ke-6 dan juga sultan buton ke-1 bernama murhum, rakyat Gu dan Mawasangka diriwayatkan patuh dan setia kepadanya. Ikatan emosional Gu dan Mawasangka terhadap Buton semakin kuat setelah Murhum berhasil membela negeri mereka. Ketika kembali ke Buton, Murhum turut membawa “*syara-pancana*” dan kemudian Gu dan Mawasangka diberinya nama “*paincana*” selaku tanda kemenangan Murhum. Nama ini kemudian lekat untuk menggambarkan kedua etnis di Buton Tengah tersebut dengan sebutan *pancana* atau *pancano*.

Keberadaan Buton Tengah juga tertuang pada Undang-undang Murtabat tujuh (sekitar tahun 1610), yakni undang-undang kesultanan Buton pada masa Sultan Buton ke-4, La Elangi (sultan dayanu ikhsanuddin). Disebutkan bahwa kesultanan Buton terdiri atas 72 kadie yang diduduki oleh 30 menteri dan 40 bobato. Sedangkan sisanya menandakan kaum yang memegang pemerintahan di pusat. Dari 70 bagian tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian besar yakni *Pale Matanayo dan Pale Sukanayo*. Lakina Lakudo, Mengepalai Wilayah Kadolo, Lawa, Tangana-Lipu, Tongkuno, Gu, Wongko, Lakudodan Wanepa-Nepa (Distrik Gu). Lakina Bombonawulu Menduduki Wilayah Bombonawulu-Kota, Rahia, Wakea-Kea, Uncume, Wongko-Bombonawulu (Distrik Gu). Kedua lakina tersebut merupakan kadie di wilayah *Pale Matanayo*.

Di wilayah *pale sukanayo*, menteri peropa mengepalai beberapa wilayah salah satunya Ballo di Distrik Kabaena (termasuk wilayah talaga saat ini), Menteri Gundu-Gundu mengepalai Kooe dan Kantolobe (Distrik Mawasangka), Menteri Melai mengepalai Boneoge (Distrik Gu), Menteri Lanto di Lalibo (Distrik Mawasangka). Menteri Wajo di wajo (Distrik Gu), Menteri Tanailandu di Wasindoi (Distrik Mawasangka). Selanjutnya Lakina Boneoge di Boneoge, Madongka, Tanga, dan Matanayo (Distrik Gu), Lakina Baruta di Baruta (Distrik Gu) Lakina Mone Di Lambale Dan Wakuru (Distrik Gu), Lakina Lolibu di Lipumalangan II Dan Tongkuno (Distrik Gu), dan Lakina Inulu di Lamena, Lagili dan Wakengku (Distrik Mawasangka). Dalam undang-undang kesultanan juga disebutkan *tamburu limaaguana* yaitu pasukan kehormatan sultan yang terdiri

atas lima kelompok yang masing-masing kelompok memiliki nama sendiri-sendiri, salah satunya Mawasangka.

B. Geografis

Bentangan wilayah	Keberadaan (√ = Ada)	Luas (Ha)
1. Desa/kelurahan dataran rendah		42
2. Desa/kelurahan berbukit-bukit		40
3. Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan	-	-
4. Desa/kelurahan lereng gunung	-	-
5. Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir	-	-
6. Desa/kelurahan kawasan rawa	-	-
7. Desa/kelurahan kawasan gambut	-	-
8. Desa/kelurahan aliran sungai	-	-
9. Desa/kelurahan bantaran sungai	-	-
Letak	Keberadaan (√ = Ada)	Luas (Ha)
1. Desa/kelurahan kawasan perkantoran		4
2. Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis	-	-
3. Desa/kelurahan kawasan campuran	-	-
4. Desa/kelurahan kawasan industry	-	-
5. Desa/Kelurahan kepulauan	-	-
6. Desa/Kelurahan pantai/pesisir	-	-
7. Desa/Kelurahan kawasan hutan		40
8. Desa/Kelurahan taman suaka	-	-
9. Desa/Kelurahan kawasan wisata	-	-
10. Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain	-	-
11. Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain	-	-
12. Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain	-	-
13. Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain		70
14. Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai	-	-
15. Desa/kelurahan rawan banjir	-	-
16. Desa/kelurahan bebas banjir		42
17. Desa/kelurahan potensial tsunami	-	-
18. Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi	-	-
Orbitasi		
1. Jarak ke ibu kota kecamatan (km)		0
a. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor (Jam)		0
b. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)		0

c. Jumlah Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit)	-
2. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota (km)	3
a. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor (Jam)	15 menit
b. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)	1 Jam
c. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota (Unit)	-
3. Jarak ke ibu kota provinsi (km)	321
a. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor (Jam)	12
b. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (Jam)	97
c. Kendaraan umum ke ibukota provinsi (Unit)	2

Tabel IV.1 Geografis Desa Walando



Gambar IV.1 Peta Buton Tengah

C. Suku Adat dan Budaya

Buton tengah terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan negeri yang indah dan penuh dengan adat istiadatnya yang selalu diwarisi turun temurun. Khususnya di Kecamatan Gu Desa Walando Kabupaten Buton Tengah adapun adat istiadatnya yaitu *bokanotau* adalah pesta kampung, yang dirayakan setiap tahun oleh Bupati Buton Tengah, saat masyarakat setempat sedang memanen jagung dan hasil jagungnya dikelolah menjadi *kambewe* (jagung yang di giling terus dikukus), *kanciniua* (jagung yang dimasak), bersamaan dengan *kasuami* (terbuat dari ubi kayu) ikan bakar dan tidak lupa lagi ada tarian daerah *tari indah* adalah tarian tradisional khas buton yang diadakan saat ada pesta adat, yang diadakan di lapangan rumpun bombonawulu.

Selain itu ada juga *isra mikraj* yang diadakan setiap tahun di masjid dengan cara masyarakat membawa makan di mesjid atas bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. *Ombono liwu* (kapung yang dikurung/dilindungi) selama satu minggu setiap malam masyarakatnya tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ribut, dan tidur di awal waktu. *Pingit/bakurung/posuo*. *Ritual posuo* diadakan sebagai sarana untuk peralihan status remaja bagi seorang gadis menjadi dewasa. Anak remaja disebut *kabuabua*, sementara gadis dewasa disebut *kalambe*.

Ritual posuo biasanya dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat di buton. Proses pengurangan dimaksud agar gadis-gadis itu lebih fokus menghadapi bimbingan *spiritual*, *petuah*, dan pesan moral lainnya. Termasuk pengetahuan tentang pernikahan dan cara membina bahtera rumah tangga yang baik. Proses *posuoterdiri* atas beberapa *ritual* yang berbeda-beda dalam pelaksanaan *tradisi*

posuo. Namun maksud dan tujuannya sama. Ada 3 jenis *posuo* yang dikenal di masyarakat buton tengah:

1. *Posuo Wolio* yang merupakan *tradisi posuo* awal yang berkembang dalam masyarakat buton.
2. *Posuo Johoro* yang berasal dari *johor melayu*.
3. *Posuo Arabu* yang berkembang setelah islam masuk ke buton. *Posuo arabu* merupakan hasil modifikasi nilai-nilai *posuo wolio* dengan nilai-nilai ajaran Islam. *Posuo* ini dikembangkan oleh Syekh Haji Abdul Ghaniyyu, seorang ulama besar buton yang hidup pada pertengahan Abad ke-19.

Keistimewaan *ritual posuo* terletak pada prosesnya. Ada tiga tahap yang mesti dilalui oleh para peserta agar mendapat status sebagai gadis dewasa. Pertama *sesi pauncura* atau pengukuhan peserta sebagai calon peserta *posuo*. Pada tahap ini proses dilakukan oleh *bhisa* senior (parika). Acara tersebut dimulai dengan *tunuana dupa* (membakar kemenyan) kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah pembacaan doa selesai, parika melakukan *panimpa* (pemberkatan) kepada para peserta dengan memberikan *sapuan asap kemenyan* ke tubuh calon. Setelah itu, parika menyampaikan dua pesan, yaitu menjelaskan tujuan dari diadakannya upacara *posuo diiringi* dengan pembacaan nama-nama para peserta upacara dan memberitahu kepada seluruh peserta dan juga keluarga bahwa selama upacara berlangsung, para peserta disolasi dari dunia luar dan hanya boleh berhubungan dengan *bhisa* yang bertugas menemani para peserta yang sudah ditunjuk oleh *pemangku adat*

Kedua *sesi bhaliana yimpo*. Kegiatan ini dilaksanakan setelah upacara berjalan selama lima hari. Pada tahap ini para peserta diubah posisinya. Jika sebelumnya arah kepala menghadap ke selatan dan kaki ke arah utara, pada tahap ini kepala peserta dihadapkan ke arah barat dan kaki ke arah timur. *Sesi* ini berlangsung sampai hari ke tujuh.

Ketiga, *sesi mata kariya*. Tahap ini biasanya dilakukan tepat pada malam kedelapan dengan memandikan seluruh peserta yang ikut dalam upacara *posuo* menggunakan *wadah bhosu* (berupa buyung yang terbuat dari tanah liat). Khusus para peserta yang siap menikah, airnya dicampur dengan bungan cempaka dan bunga *kamboja*. Setelah selesai mandi, seluruh peserta *didindari* dengan busana *ajo kalambe* (khusus pakaian gadis dewasa). Biasanya peresmian tersebut dipimpin oleh istri *moji* (pejabat masjid keraton buton). Semua upacara *posuo* dimaksudkan untuk menguji kesucian (keperawanan) seorang gadis. Biasanya hal ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya gendang yang pecah saat ditabuh oleh para *bhisa*. Jika ada gendang yang pecah, menunjukkan ada di antara peserta *posuo* yang sudah tidak perawat dan jika tidak ada gendang yang pecah berarti para peserta diyakini masih perawan.

D. Lembaga Kemasyarakatan

Nama Lembaga	Dasar Hukum Pembentukan	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus	Ruang Lingkup Kegiatan	Jumlah Jenis Kegiatan
LKMD/LKMK					
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN	04/ 2013	1	15	Perencanaan	1
PKK	02/ 2014	1	11	Pemberdayaan	1
RUKUN WARGA		1	4		1
RUKUN TETANGGA		1	14		
KARANG TARUNA	02/ 2010	1	3	Kepemudaan	1
KELOMPOK TANI/NELAYAN	010/ 2008	5	15	Simpan Pinjam	1
LEMBAGA ADAT	06/2012	1	9	Adat	1
BADAN USAHA MILIK DESA		-			
ORGANISASI KEAGAMAAN	08/ 2002	3	12	Keagamaan	1
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN	03/ 2003	1	5	Arisan	1
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA	09/ 2003	1	20	Keagamaan	1
ORGANISASI PROFESI LAINNYA		-			
ORGANISASI BAPAK		-			
KELOMPOK GOTONG ROYONG		1			
PWI		-			
IDI		-			
PARFI		-			
PECINTA ALAM		-			
WREDATAMA		-			
KELOMPOK PEMIRSA		-			
PANTI ASUHAN		-			
YAYASAN	01/ 2003	1	24	Pendidikan	1

Tabel IV.2 Lembaga Kemasyarakatan

E. Sistem Perekonomian

1. Usaha jasa dan perdagangan adapun jenis usahanya yaitu jenis produk yang di perdagangan adalah kios/pedangang kaki lima.
2. Usaha jasa gas, listrik, BBM, dan air adapun jenis usahanya yaitu mengencer gas dan minyak dan bahan bakar minyak.
3. usaha jasa keterampilan adapun jenis usahanya adalah tukang batu, tukang

jahit, tukang kayu, tukang gali sumur, tukang pijat.

4. Usaha jasa penginapan adapun jenis yang diusahakan yaitu persewahan kamar dan kontrakan rumah.
5. Usaha jasa pengangkutan adapun jenis usahanya yaitu ekspedisi dan pengiriman di truk terbuka dan mobil pick up terbuka.
6. Industri kecil dan menengah adapun jenis usahanya yaitu industri material bahan bangunan dan rumah makan.
7. Unit usaha desa adapun jenis usaha desa yaitu kelompok simpan pinjam.

F. Sistem Kepercayaan

Sebelum masuknya pengaruh hindu ke hindu oleh bangsa majapahit pada abad ke-13 dan Islam yang di bawah pada Abad 15, masyarakat buton mengenal dan memiliki kepercayaan yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang (animisme dan dinamisme). Masuk agama Hindu-Islam mendorong masyarakat buton mulai menganut agama Hindu-Islam walaupun tidak meninggalkan kepercayaan asli seperti pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan dewa-dewa alam. Misalnya masyarakat nelayan wakatobi khususnya tomia mengenal adanya dewa laut *Wa Ode Maryam* yang dipercaya dapat menjaga mereka dalam mengarungi lautan banda yang terkenal ganas. Disamping itu masyarakat Buton juga mengenal dewa yang Melindungi keberadaan hutan yang dikenal dengan nama *Wa Kinam* (tidak boleh disebut namanya/hanya diucapkan dengan cara berbisik).

Masuknya islam di Buton pada Abad ke-15, yang di bawah oleh ulama dari Patani juga telah meletakkan dasar-dasar ilmu fisik kepada *kesultanan* dan masyarakat Buton. Ilmu fisik merupakan ilmu Islam yang mempelajari hukum

dan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban umat terhadap Allah dan selama manusia sehingga masyarakat Buton dapat hidup sesuai dengan Kaidah Islam. Dan pada abad ke-16 M, lahir dasar-dasar ilmu Qalam dan Tasawuf di Buton yang di bawah oleh *Sufi* yang berasal dari Aceh.

G. Pendidikan Masyarakat

1. Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah (Orang)
• Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	73
• Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	74
• Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	7
• Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	203
• Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	69
• Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	136
• Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	203
• Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	133
• Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	69
• Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	97
• Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	140
• Jumlah penduduk sedang D-1	-
• Jumlah penduduk tamat D-1	-
• Jumlah penduduk sedang D-2	6
• Jumlah penduduk tamat D-2	12
• Jumlah penduduk sedang D-3	5
• Jumlah penduduk tamat D-3	27
• Jumlah penduduk sedang S-1	32
• Jumlah penduduk tamat S-1	72
• Jumlah penduduk sedang S-2	2
• Jumlah penduduk tamat S-2	2
• Jumlah penduduk tamat S-3	-
• Jumlah penduduk sedang SLB A	-
• Jumlah penduduk tamat SLB A	-
• Jumlah penduduk sedang SLB B	-
• Jumlah penduduk tamat SLB B	-

• Jumlah penduduk sedang SLB C	-
• Jumlah penduduk tamat SLB C	-
• Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	7
• % Penduduk buta huruf [(1): jumlah penduduk] x 100%	16,3 %
• % Penduduk tamat SLTP/ sederajat [(3): jumlah penduduk] x 100%	12,1 %
2. Wajib belajar 9 tahun	
a) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	370
b) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	356
c) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	115
3. Rasio Guru dan Murid	
a. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	3
b. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	49
c. Jumlah guru SD dan sederajat	18
d. Jumlah siswa SD dan sederajat	451
e. Jumlah guru SLTP dan sederajat	-
f. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	-
g. Jumlah guru SLTA/ sederajat	-
h. Jumlah siswa SLTA/ sederajat	-
i. Jumlah siswa SLB	-
j. Jumlah guru SLB	-
4. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	
Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan (Unit)	-
Jumlah taman bacaan desa/ kelurahan (Unit)	-
Jumlah perpustakaan keliling (Unit)	-
Jumlah sanggar belajar (Unit)	-
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah (Kegiatan)	-
Jumlah kelompok belajar Paket A (Kelompok)	-
Jumlah peserta ujian Paket A (Orang)	-
Jumlah kelompok belajar Paket B (Kelompok)	-
Jumlah Peserta ujian Paket B (Orang)	4
Jumlah kelompok belajar Paket C (Kelompok)	-
Jumlah peserta ujian Paket C (Orang)	2
Jumlah lembaga kursus keterampilan (Unit)	-
Jumlah peserta kursus keterampilan (Orang)	-

Tabel IV.3 pendidikan masyarakat.

BAB V
PROSES PEMBAGIAN BERAS RASKIN DI DESA WALANDO
KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH

A. Proses Pembagian Beras Raskin



Gambar V.1 Proses Pembagian Beras Raskin di Balai Desa Walando

Mekanisme atau proses pelayanan pembagian beras raskin, sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengamatan yang peneliti lakukan terkait dengan proses pelayanan pembagian beras raskin meliputi kelengkapan persyaratan dalam pembagian beras raskin.

B. Hasil Penelitian

Setelah melakukan observasi dan wawancara, adapun hasil wawancara yang telah peneliti rangkum. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dari berbagai sumber. Adapun sumber-sumber tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut pendapat Bapak MSD Kepala Desa Walando (43 tahun), mengatakan bahwa:

“Cara pembagian beras raskin yaitu masyarakat diundang secara langsung dengan cara mengumumkan di masjid bahwa ada pembagian beras raskin, setelah itu dirapatkan di Kantor Balai Desa Walando bersama dengan kepala desa, staf pekerja dan masyarakat. Di dalam rapat kepala desa walando menjelaskan kepada masyarakat yang sudah hadir di kantor balai desa walando yang berhak menerima beras raskin yaitu sudah terdaftar namanya di pendataan atau kelapa keluarga yang kurang dalam kebutuhan pangannya (miskin) bahwa setiap satu kepala kelurga mendapatkan 12 liter, satu liter beras berharga 2000 rupiah dan dibagi secara perdesun, penerimaan beras setiap satu tahun 4 kali dalam penerimaan beras”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak MSD Kepala Desa Walando peneliti menyimpulkan tentang proses pembagian beras raskin yaitu diumumkan di masjid pembagian beras raskin, dirapatkan di Kantor Balai Desa Walando, kepala desa menjelaskan tentang pembagian beras raskin kepada masyarakat yang sempat hadir di Kantor Balai Desa Walando.

Hal yang senada di ungkapkan oleh Bapak RI sekretaris kepala desa walando (42 tahun), mengatakan bahwa:

“Pembagian beras raskin dilakukan dengan cara diumumkan di mesjid untuk memudahkan masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahuinya secara keseluruhan”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak RI sekretaris kepala desa walando peneliti menyimpulkan dalam pembagian beras raskin masyarakat diumumkan di

masjid agar semua masyarakat di Desa Walando bisa mengetahui pembagian beras.

Adapun hasil wawancara dari Ibu WA (36 tahun), mengatakan bahwa:

“Cara pembagian beras raskin bahwa saya hanya mendengar di masjid bahwa hari ini ada pembagian beras lalu saya datang di sini hanya menulis nama di kepala dusun dan saya diminta karung beras lalu diliterkan setelah itu membayar harga beras tersebut satu liter berharga Rp 2000 rupiah dan 12 liter setiap satu kepala keluarga dengan total harganya Rp 24.000”.

Dari hasil wawancara di atas kesimpulannya adalah masyarakat mendengar di masjid tentang pembagian beras raskin harga satu liter beras Rp 2000 rupiah satu kepala keluarga mendapat 12 liter total yang dibayar Rp 24.000 rupiah.

Hal senada diungkapkan oleh Bapak HLK kepala dusun Walanda (45 tahun), mengatakan bahwa:

“Pembagian beras raskin masyarakat yang menerima beras raskin hanya menulis namanya setelah itu diliterkan sebanyak 12 liter satu kepala keluarga satu liter berharga 200 setelah selesai penerimaan beras nama-nama yang ditulis diberikan kepada kepala desa walando sebagai bukti sekian kepala keluarga yang sudah ambil beras”.

Dari hasil wawancara di atas kesimpulannya adalah masyarakat yang mengambil beras harus menulis mendaftar namanya di Kepala Dusun.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebelum pelayanan pembagian beras raskin di Kantor Balai Desa Walando diadakan rapat, tentang cara pembagian beras yaitu Kepala Desa membagikan daftar penerimaan beras raskin Kepada Staf Pekerja/ Kepala Dusun. Dusun di Desa Walando terbagi 5 Dusun yaitu *Dusun Pimpi*, *Dusun Walanda*, *Dusun Tongkoea*, *Dusun Cihoe*, *Dusun Watete*. Masyarakat setempat membantu Kepala Dusun untuk mengangkat karung beras dan membuka karung beras lalu

berasnya dihamburkan di tehel dengan membatasi karung-karung yang berisi beras agar berasnya tidak terhambur kemana-mana lanjut meliter sesuai yang disuruhkan kepala dusun karena masyarakat mengabilkan beras dengan keluarganya yang belum sempat hadir karena ada urusan atau nenek/kakeknya yang tidak kuat mengangkat beras tersebut. Kepala dusun menulis nama-nama yang sesuai dusunnya masing-masing, setelah itu Kepala Keluarga yang berhak menerima, uang sebesar 24.000 karena satu liter berharga 2000 rupiah.

Pimpi	Walanda	Tongkoea	Cihoe	Watete
Wa MA	Wa AI	La MSI	La IA	Wa AP
La NE	La AT	RI	Wa ID	Wa ML
La UR	Wa UO. D	Wa ANE	La HN	La BI
La BI	La SI	YO	Wa MRA	La NS
Wa AA	La LO	La BE	La EM	La OS
La AO	La ID	La RI	Wa HI	La AM
La WA	La US	La OI. L	La IA	La IO
La HO	La FI	RN. R	La AN	Wa IU
Wa HE	Wa NE	DN	La HE	L AD
La SA	Wa SH	La AI. B	La ME	Wa DA
Wa AE	La UU	SU. S	La ALI	Wa AR
La AN	Wa MI	La KI	La KU	La BU
La RA	La DI	La NU	La UI	La AP
La OE	La HI	La LCI	La RL	La SI
La MU	La KEU	La IL	La II	La BA
La MD	La KI	La SL	La NN	La KS
La KU	La LI	La KU	La SI	La PA
La HI	La SN	La ME	La TU	La HD
La IO	La JI	La ZI		La IM
La NA	La SI	La AN		La IO
La IA	La MD			La IS

Tabel V.1 Data Dusun Penerimaan Beras di Desa Walando.

C. Penjabaran Hasil Penelitian

Proses pembagian beras raskin yang dilakukan di desa Walando, sebelumnya di rapatkan oleh kepala desa dan staf desa yang membahas tentang siapa-siapa saja keluarga yang berhak menerima beras raskin. Adapun takaran dari beras raskin yang sudah ditentukan adalah setiap satu kepala kelurga mendapatkan 12 liter, satu liter berharga 2000 rupiah dan dibagi secara perdusun. Cara mengsosialisasikan pembagian beras raskin yaitu diumumkan di mesjid untuk mempermudah setiap masyarakat mengetahui informasi tanpa harus keliling rumah masyarakat disekitar. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah jumlah kepala keluarga sebanyak 300 kepala keluarga, yang menerima beras raskin 100 kepala keluarga. Adapun bentuk pembagian beras raskin yaitu dengan pembagian beras perliter, setiap liter dihargai Rp.2000. Setiap kepala keluarga maksimal membeli beras raskin sebanyak 12 liter, dan ada juga kepala keluarga yang mampu/kaya menerima beras raskin sehingga masyarakat miskin harus berbagi beras raskin dengan masyarakat yang mampu/kaya sehingga terjadilah diskriminasi sistem pembagian beras raskin tidak merata karena staf pekerja di balai desa walando tidak memperhatikan kepala keluarga miskin dan kepala keluarga mampu/kaya yang menerima beras raskin.

Masyarakat yang berhak menerima beras raskin yaitu jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun ke atas, Aspek

pendidikan (keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 10-13 tahun), Aspek pangan (seluruh anggota keluarga tidak mampu makan nasi minimal dua kali sehari dan di ganti makanan ubi, jagung). Aspek sandang (lebih dari sebagian anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal sepuluh stel), Aspek papan (tempat tinggal/ rumah berlantai tanah/ berdinding bambu), Aspek kesehatan (bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar), Aspek kekayaan jumlah kekayaan/aset milik keluarga, Aspek air (tidak menggunakan air PAM. untuk keperluan makan dan minum), Aspek listrik (tidak menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga), Jumlah anggota/ jiwa dalam kepala keluarga (termasuk kepala keluarga) 5 jiwa atau lebih.

Dari prosedur pembagian beras raskin yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat, tidak selamanya berjalan sesuai dengan rencana karena ada sebagian beras raskin yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi sehingga membuat masyarakat mengeluh namun kenyataannya bahwa tidak ada pilihan lain untuk mengkonsumsi beras yang tidak layak tersebut.

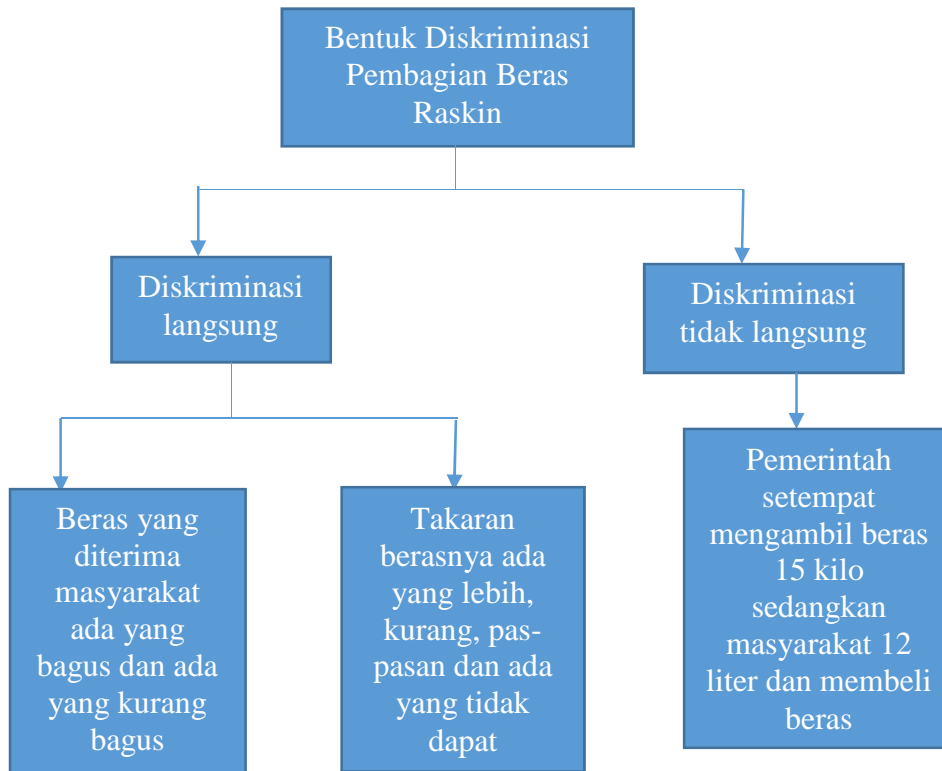
D. Kaitanya dengan Teori

Program raskin sebenarnya didasarkan pada sistem pemerintahan negara Indonesia yang menganut *welfare state*. Negara yang menganut sistem dimaksud memegang prinsip yaitu negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat lewat penetapan kebijakan publik, namun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ulasan singkat program raskin menunjuk bahwa

program dimaksud memang ditetapkan dengan pendekatan atas ke-bawah (*top-down approach*). Hal itu jelas terlihat dimana para pembuat kebijakan menetapkan kebijakan publik pengentasan kemiskinan melalui pembentukan TNP2K sebagai lembaga perumus kebijakan bantuan sosial serta penunjukan perum Bulog sebagai agen distributor beras. Pembagian beras raskin yang dilakukan di Desa Walando telah mengikuti prosedur pemerintah yaitu meningkatkan perlindungan sosial dengan bantuan pangan dalam bentuk beras bersubsidi. Teori ini sangat jelas kaitannya dengan prosedur pembagian beras raskin di desa Walando yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di desa Walando seperti mampu memenuhi kebutuhan pangan terhusus untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

BAB VI
BENTUK DISKRIMINASI PEMBAGIAN BERAS RASKIN DI DESA
WALANDO KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH

A. Diskriminasi Sistem Pembagian Beras Raskin



Gambar VI.1 Bentuk Diskriminasi Pembagian Beras Raskin

Secara bahasa diskriminasi berasal dari bahasa Inggris “Discriminate” berarti membedakan. Dan dalam bahasa Arab istilah diskriminasi dikenal dengan al-muhabbah yang artinya membedakan kasih. Kosakata bahasa Indonesia diskriminasi yaitu suatu sikap yang membedakan orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan lain sebagainya (Lukman 2013). Kesimpulannya yaitu diskriminasi merupakan suatu kejadian yang bisa dijumpai dalam masyarakat,

disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain.

Diskriminasi yang terjadi di desa Walando yaitu :

1. Diskriminasi langsung. Terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama.
2. Diskriminasi tidak langsung. Terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. (Lukman 2013).
Kesimpulannya adalah yang membahas tentang peraturan diskriminasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, peneliti telah merangkum hasil wawancara diskriminasi pembagian raskin yang terjadi di desa Walando di lakukan di lapangan yaitu:

Adapun hasil wawancara dari bapak RI (42 tahun) Sekertaris kepala desa walando mengatakan bahwa:

“Bentuk diskriminasi pembagian beras raskin yaitu kepala desa mendapatkan beras 15 kilo sedangkan masyarakat 12 liter tanpa ketahuan dari masyarakat, kepala desa tidak membeli beras sedangkan masyarakat membeli beras, staf pekerja mendapatkan beras 15 kilo perorang sedangkan masyarakat mendapatkan beras dengan cara membeli dan hanya 12 liter saja dan takaran beras yang seharusnya 15 kilo menjadi 12 liter karena banyak masyarakat yang mau ambil beras”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka kesimpulannya adalah secara tidak langsung pemerintah yang ada di Desa Walando sudah mengambil hak masyarakat miskin tanpa pengetahuan dari masyarakat yang berhak menerima beras raskin.

Adapun hasil wawancara dari ibu ID (40 tahun), mengatakan bahwa:

“Saya mendapat beras yang kurang bagus dan saya bandingkan dengan tetangga saya beras kami berbeda beras yang saya dapat hampir semua patah sedangkan tetangga saya lumayan bagus”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa beras yang diterima masyarakat ada yang bagus dan ada yang tidak bagus.

Adapun hasil wawancara dari bapak ML (40 tahun), mengatakan bahwa:

“Saya hanya mendapatkan beras 12 liter sedangkan teman saya mendapatkan 13 liter”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka kesimpulannya adalah sebagian masyarakat mendapatkan beras pas-pasan dan lebih 1 liter.

Adapun hasil wawancara dari bapak AT (41 tahun), mengatakan bahwa:

“Saya kurang mendapatkan beras karena datang terlambat dalam pembagian beras sehingga saya hanya dapat 10 liter beras saja sedangkan masyarakat yang terlambat lainnya ada yang dapat 11, 12 liter”.

Dari hasil wawancara informan bapak AT dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang datang terlambat dalam pembagian beras raskin maka pembagian berasnya tidak seimbang lagi.

Adapun hasil wawancara dari ibu AM (39 tahun), mengatakan bahwa:

“Saya tidak mendapatkan beras karena saya terlambat dua hari dalam pembagian beras”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kesimpulannya bahwa masyarakat yang terlambat dalam pembagian beras maka tidak dapat beras apa lagi 2 hari.

Hasil wawancara Bapak IM (43 tahun), mengatakan bahwa:

“Saya diberikan beras lebih sebanyak 15 liter dengan harga Rp 2000 perliter total pembayaran saya Rp 24.000 kerana saya membantu Kepala Desa meliterkan beras sedangkan teman saya yang membantu Kepala Dusun yang lain mendapatkan 16 liter”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka kesimpulannya adalah masyarakat yang membantu kepala dusun maka diberi beras yang lebih dan harga berasnya sama.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penelitian di Kantor Balai Desa Walando tempat pembagian beras raskin terjadi diskriminasi yaitu berasnya ada yang bagus dan kurang bagus, dikurangi takarangnya yang seharusnya 15 kilo menjadi 12 liter satu Kepala Keluarga, peneliti tidak sengaja menemukan sisa karung beras yang menumpuk di dalam gudang, masyarakat yang lupa membawah karung beras disuruh membeli karung beras dengan harga Rp 1000, masyarakat yang tidak datang ambil beras dijual sama masyarakat yang lain tetapi harganya tidak sama dengan masyarakat yang mendapatkan beras harga perliter Rp 4000, ada masyarakat yang mendapatkan beras kurang, lebih dan pas-pasan, dan setelah pembagian beras raskin selesai kepala desa dan staf mengambil bagian beras masing-masing.



Gambar VI.2 Terdapat Sisa Beras di Dalam Gudang

B. Penjabaran Hasil Penelitian

Diskriminasi yaitu sikap yang membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan lain sebagainya (Lukman 2013). Sedangkan menurut PBB, diskriminasi mencakup terhadap perilaku apa saja yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. Setelah melakukan penelitian langsung dilapang tentang bentuk diskriminasi pembagian beras raskin di Desa Walando, telah mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap masyarakat yang ada di Desa Walando. Diskriminasi pembagian beras raskin yang dialami oleh masyarakat desa Walando seperti membeda-bedakan beras yang diterima oleh masyarakat, ada beberapa masyarakat yang mendapatkan beras tidak sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan.

Contohnya seperti beberapa masyarakat mendapatkan beras raskin yang kurang bagus dan takaran beras tidak sesuai dengan takaran yang sesungguhnya. Namun masyarakat tidak mampu memprotes pemerintah setempat karena mereka takut tidak mendapatkan beras lagi dan takut akan adanya diskriminasi selanjutnya. Sebelumnya masyarakat pernah memprotes kepala desa Walando terhadap diskriminasi yang dilakukan, namun masyarakat tidak didengarkan dan tidak dihiraukan. Sehingga itu masyarakat tidak mau lagi memprotes pembagian raskin yang tidak merata.

C. Kaitannya dengan Teori

Teori Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial menurut Max Weber adalah stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise. Dasar-dasar pembentukan peran sosial antara lain: (Ritzer George, dkk. 2012).

1. Ukuran kekayaan

Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem lapisan sosial, demikian pula sebaliknya, yang tidak mempunyai kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaian, maupun kebiasaan dalam berbelanja.

2. Ukuran kekuasaan dan wewenang

Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem lapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan.

3. Ukuran kehormatan

Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakat. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur.

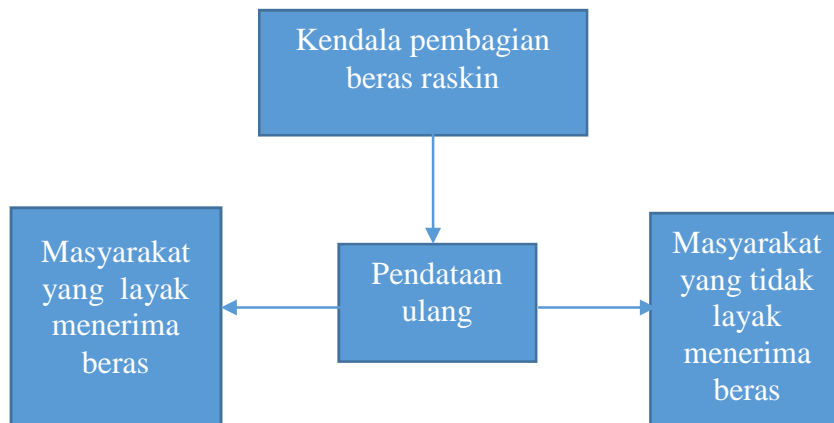
4. Ukuran ilmu pengetahuan

Sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insiyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor.

Diskriminasi pembagian beras raskin yang terjadi di desa Walando yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat oleh masyarakat yang ada di Desa Walando sehingga banyak masyarakat yang telah dirugikan. Kaitan dari teori stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber adalah stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise. Yang menyebabkan sehingga terjadinya statifikasi sosial adalah ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Masyarakat miskin yang ada di desa Walando yang mengalami diskriminasi pembagian beras raskin karena sebagian masyarakat tidak memiliki kekuasaan, kehormatan, kekayaan dan ilmu pengetahuan sehingga dengan mudahnya terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, walaupun masyarakat yang ada di desa Walando pernah memprotes diskriminasi tersebut namun tidak didengarkan karena mereka tidak memiliki kekuasaan ataupun wewenang sehingga diskriminasi masih terus dilakukan dengan bentuk diskriminasi langsung maupun tidak langsung.

BAB VII
KENDALA PEMBAGIAN BERAS RASKIN DI DESA WALANDO
KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH

A. Kendala Dalam Pembagian Beras Raskin



Gambar VII.1 Kendala Pembagian Beras

Kendala yang dihadapi pemerintah di Desa Walando dalam pembagian beras raskin yaitu tentang pendataan yang tahun 2009 seharusnya diganti dengan pendataan baru agar tidak ada kecemburuan sosial antara kepala keluarga yang miskin dengan kepala keluarga yang mampu untuk itu pemerintah yang mendata nama-nama kepala keluarga yang menerima beras raskin seharusnya mendata ulang atau mensurve kembali nama-nama kepala keluarga yang berhak menerima beras raskin.

B. Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan Bapak MSD (43 tahun) Kepala Desa Walando, mengatakan bahwa:

“kendala yaitu pemerintah yang mendata penerimaan beras raskin harus mendata ulang sehingga kami tidak keliru dalam pembagian beras kepada kepala keluarga yang berhak menerima beras dan kepala keluarga yang tidak berhak menerima beras”.

Dari hasil wawancara dengan bapak MSD Kepala Desa Walando peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah harus mendata ulang agar pemerintah yang bekerja di Balai Desa Walando tidak keliru dalam pembagian beras raskin.

Hasil wawancara dengan Bapak RI (42 tahun) Sekertaris Kepala Desa Walando, mengatakan bahwa:

“Kepala keluarga baru yang tidak terdaftar namanya di pendataan meminta diberikan beras karena dalam kebutuhannya sehari-hari kurang mengkonsumsi beras hanya makan jagung atau ubi dan kadang-kadang dalam satu hari itu makan satu kali”.

Dari hasil wawancara dengan bapak RI Sekertaris Kepala Desa Walando peneliti menyimpulkan bahwa kepala keluarga yang tidak terdaftar namanya dipendataan ingin mendapatkan beras karena kurang dalam kebutuhan pangannya.

Hasil wawancara dengan Bapak GF (39 tahun) Kepala Dusun langgohe, mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang berhak menerima beras raskin dan yang tidak berhak menerima beras raskin kadang-kadang sulit dibedakan karena hampir semua kepala keluarga ingin mendapatkan beras”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak GF kepala dusun langgohe peneliti menyimpulkan bahwa Kepala Dusun sulit membedakan antara kepala keluarga yang berhak menerima beras dan yang tidak berhak menerima beras.

Hasil wawancara dengan Ibu WM (39 tahun) mengatakan bahwa:

“saya tidak mendapatkan kendala dalam pembagian beras”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kesimpalannya di atas bahwa masyarakat tidak dapat kendala pembagian beras.

Hasil wawancara dengan Ibu WM (40 tahun) mengatakan bahwa:

“saya berkendala dalam penulisan nama karena saya tidak sekolah untungnya ada kepala dusun yang menuliskan nama ku”.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat tidak dapat menulis namanya.

Hasil wawancara dengan saudara LU (20 tahun) mengatakan bahwa:

“saya tidak tahu tentang pembagian beras raskin karena saya pertama kali datang di Balai Desa Walando untuk mengambil beras buat nenek saya oleh karena itu saya bingung kalau ada pembagian beras perdusun dan saya tidak tahu dusun apa yang di tempati nenek saya akhirnya saya pulang ke rumah nenek saya untuk menanyakan nama dusun yang di tempati nenek saya, setelah itu saya datang lagi untuk mengambil beras di Kepala Dusun *Langgohe*”.

Dari hasil wawancara peneliti di atas kesimpulannya adalah saudara LU tidak pernah datang di Balai Desa Walando untuk mengambil beras raskin karena ingin membantu neneknya maka dia tidak tahu tentang pembagian beras raskin secara perdusun akhirnya saudara LU pulang balik antara Kantor Balai Desa Walando dengan rumah neneknya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti tentang kendala dalam pembagian beras raskin adalah banyak masyarakat yang tidak terdaftar namanya dipendataan ingin mendapatkan beras raskin, sebagian masyarakat tidak dapat menulis namanya karena tidak pernah menginjak bangku sekolah, Kepala Dusun terkendala dalam meliter beras dengan menulis atau mendata nama yang menerima beras raskin karena sebagian masyarakat tidak tau baca dan tulis, ada sebagian tidak pernah datang di Balai Desa Walando untuk mengambil beras raskin karena ingin membantu neneknya yang tidak kuat lagi untuk mengangkat beras.

C. Kaitan dengan Teori Sistem-Sistem

Menurut Buckley yaitu apa yang harus diperoleh sosiologi dari teori sistem-sistem *pertama* karena teori sistem-sistem berasal dari ilmu pasti dan karena, setidaknya dimata para pendukungnya, dapat diterapkan kepada semua ilmu perilaku dan sosial, ia menjanjikan kosa kata umum untuk menggabungkan ilmu-ilmu itu. *Kedua* teori sistem-sistem bertingkat-tingkat dan dapat diterapkan sama baiknya kepada aspek-aspek dunia sosial pada skala terbesar dan skala terkecil, yang paling objektif dan paling subjektif. *Ketiga* teori sistem-sistem tertarik kepada aneka relasi aspek-aspek jamak dunia sosial sehingga bekerja melawan analisis dunia sosial yang sepotong-sepotong (Ritzer George, dkk. 2012). Pengertian sistem artinya sehimpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Merujuk pada teori sistem yang telah dijelaskan sebelumnya, sehubungan dengan kendala pembagian beras raskin yang terjadi di Desa

Walando sangat jelas yang menyebabkan yaitu karena sistem pemerintahan yang ada di Desa Walando sangat berpengaruh, peraturan dan sistem yang sudah ditetapkan pemerintah tidak berjalan dengan semestinya kerana dipengaruhi oleh beberapa aparat pemerintah yang tidak memperdulikan tanggung jawab yang semestinya sehingga tanggung jawab mereka terabaikan, baik dari prosedur dalam pembagian beras raskin ataupun dari segi akomodasi dan transportasi. Sehingga itu dampak yang ditimbulkan dari sistem yang tidak berjalan sesuai dengan seharusnya menyebabkan masyarakat mengalami kerugian.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penelitian, data yang berhasil dihimpun tentang Diskriminasi Sistem Pembagian Beras Raskin Di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya diskriminasi sistem pembagian beras raskin di desa Walando adalah masyarakat tidak mengetahui proses pembagaian beras raskin yang sebenarnya karena kepala desa dan staf pekerja di balai desa Walando tidak menjelaskan dengan detail tentang proses pembagian beras raskin, masyarakat tidak mengetahui bahwa pembagian yang sebenarnya 15 kilo bukan 12 liter.
2. Bentuk diskriminasi pembagian beras raskin yang ada di Desa walando yaitu diskriminasi langsung dan tidak langsung. Sebagian masyarakat mendapatkan beras yang tidak layak dikonsumsi, sebagian pula masyarakat tidak mendapatkan beras karena uang mereka kurang. Keterlambatan masyarakat yang datang sehingga banyak masyarakat tidak mendapatkan beras disebabkan oleh tidak adanya toleransi dan pembagian beras yang tidak merata dan menyeluruh.
3. Kendala pembagian beras raskin yang ada di desa walando disebabkan oleh kelalaian pemerintah stenpat kerana mereka masih menggunakan data yang lama sehingga jika ada penambahan penduduk yang ada di desa walando

tidak tehitung dan tidak mendapatkan beras raskin. Dari segi transportasi sangat sulit dijangkau kerana rute yang cukup jauh dan transportasi yang sangat minim sehingga membutuhkan dana yang cukup besar.

B. Saran

1. Pemerintah

Untuk pemerintah setempat diharapkan mampu memperhatikan pengelolah dari pembagian beras raskin, mulai dari data masyarakat yang selalu diperbaharui dari tahun ketahun sehingga memudahkan dalam pembagian beras raskin sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan beras raskin. Dan diharapkan kepada aparat pemerintah dan staf lebih memperhantikan integritas dengan pekerja yang profesional, melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan tidak pandang bulu terhadap masyarakat yang lainnya.

2. Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat yang ada di Desa Walando untuk saling bekerja sama, toleransi yang tinggi sehingga dapat menimbulkan rasa solidaritas untuk bersikap tegas dan peduli kepada aparat pemerintah setempat sehingga tidak ada lagi diskriminasi pembagian beras raskin yang ada di desa walando.

3. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan dan menjadikan perbandingan dari peneliti terdahulu baik dari segi

pembahasan ataupun metode penelitian menjadi lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyan Sofwatul (2014). *Pengertian Sistem*. Jakarta: Jagat Sistem Informasi.
- Arifashkaf (2013). *Pengertian Sistem*. Jakarta: Blogspot.co.id
- Arifin Jamaluddin, dkk. (2015). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Arikunto, (2010). *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin, (2009). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- Jogianto (2013). *Pengertian dan Definisi Sistem*. Jakarta: Jagat Sistem Informasi.
- Depdagri, (2009). *Pengertian Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)*. Jakarta: Skripsi.
- Effndi Noer Tadjudin (2007). *Pengertian Kemiskinan*. Jakarta: Skripsi.
- Harmoko, (2014). *Pengertian Perbedaan Kepentingan*. Surabaya:
- Julham Jhoelk, (2015). *Tujuan tentang raskin*. Bone: STKIP Muhammadiyah Bone.
- Kemenko kesra, (2013). *Pedoman Umum Raskin*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Kemenko kesra, (2014). *Pedoman Umum Raskin*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Kiswanti, (2013). *Tujuh Permasalahan Program Raskin*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- KPK. (2014). *Kajian Kebijakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin)*. Jakarta: Direktorat Penelitian Dan Pengembangan KPK
- Kurniawan Fajar, (2017). *Teori Diskriminasi*. Bandung: Blogspot.co.id.
- Lukman, (2013). *Mania Ilmu*. Yogyakarta: Blogspot.co.id.
- Muqtadir Malik, (2016). *Definisi Kemiskinan*. Jakarta: Blogger.
- Narwoko J. Dwi dan Suyanto Bagong. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Notoatmodjo, (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh, Pasal 33 ayat (3) dan 34.

Peraturan pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan.

Pitapurwati Winria, (2014). *Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumorong Kabupaten Mamasa*. Makassar: Skripsi

Putra Andika, (2014). *Menghindari Sikap Diskriminasi*. Jakarta: Makalah.

Retty Anggela, (2014). *Perilaku Tercela Riya, Aniaya Diskriminasi Tercela*. Ciamis: Makalah.

Rikimaulana (2013). *Penyebab Timbulnya Diskriminasi*. Bandung: Makalah.

Ritzer George, dkk. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

RPJM Nasional, (2010-2014). *Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Skripsi.

Saripati, (2014). *Persepsi Penerima Raskin Di Dalam Menerima Bantuan Raskin*. Semarang: Skripsi

Setiadi Elly M. dan Kolip Usman, (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosioal: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.

Simanis, (2017). *Macam-macam bentuk diskriminasi*. Yogyakarta: Jagat Informasi.

Sitepu, Anwar, (2014). Faktor-faktor penyebab ketidak tepatan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Raskin), *majalah informasi kesejahteraan sosial* Vol 19 No. 3, 2014.

Sitepu, dkk. (2014). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Raskin 2014*, Jakarta: P3KS Press.

Soekanto Soerjono, (2007) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suardi dkk. (2016). *Teori Sosiologi Klasik, Modern, Posmodern, Sainifik, Hermeneutik, Kritis Evaluatif dan Integratif*. Makassar: Writing Revolution.

Subarsono, AG. (2005). *Analisis kebijakan publik. Konsep, Teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sugiono (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Paduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Suryadi Ekoman, (2016). *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Tahun 2015 Di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*. Bandar Lampung: Skripsi.

Trinugroho, dkk. (2011). *Landasan Teori Program Raskin*. Jakarta: UPP YKPM.

Yin, (2007). *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: Grafindo Persad

Daftar Pertanyaan

Tabel 1

Topik Wawancara : Proses pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.	
Narasumber	: Kepala Desa
Pewawancara	: Norma
Pertanyaan:	
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana langkah awal dalam pembagian beras ?2. Berapa harga beras miskin di Desa Walando?3. Berapa maksima setiap kepala keluarga mendapatkan beras miskin di Desa Walando?4. Berapa kali dalam setahun pembagian beras raskin di Desa Walando?	

Daftar Pertanyaan

Tabel 3

Topik Wawancara : Bentuk diskriminasi pembagian beras raskin di desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.	
Narasumber	: Masyarakat
Pewawancara	: Norma
Pertanyaan:	
1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap diskriminasi pembagian beras miskin yang ada di Desa Walando?	
2. Apa harapan masyarakat terhadap pemerintah setempat sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi pembagian beras miskin di Desa Walando?	

Daftar Pertanyaan

Tabel 2

Topik Wawancara : Kendala pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.	
Narasumber	: Staf Pekerja
Pewawancara	: Norma
Pertanyaan:	
1. Apa yang menyebabkan sehingga terjadinya pembagian raskin yang tidak merata di Desa Walando?	
2. Bagaimanakah proses staf pekerja dalam melayani masyarakat pada saat pembagian beras miskin di Desa Walando?	

Daftar Pertanyaan

Topik Wawancara : Diskriminasi sistem pembagian beras raskin di Desa

Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

Narasumber : Pemerintah, Staf pekerja dan masyarakat.

Pewawancara : Norma

Pertanyaan:

1. Apa tujuan utama pembagian beras raskin?
2. Apakah dengan adanya beras raskin mampu mengurangi kemiskinan?
3. Bagaimanakah sistem pembagian beras raskin di Desa Walando?
4. Apa yang menjadi kendala Pemerintah setempat dalam pembagian beras raskin di Desa Walando?
5. Berapa kali dalam setahun pembagian beras raskin di Desa Walando?
6. Berapa jumlah penduduk di Desa Walando?
7. Siapakah yang berhak menerima beras raskin?
8. Berapa harga beras raskin di Desa Walando?
9. Berapakah kepala keluarga yang terdaftar dalam pendataan penerimaan beras raskin?
10. Apakah anda tahu apa itu diskriminasi?
11. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap diskriminasi pembagian beras raskin?
12. Apa harapan masyarakat kepada pemerintah setempat sehingga tidak terjadi diskriminasi pembagian beras raskin di Desa Walando?

Daftar Nama Informan

Pemerintah Setempat

Nama : Mursidi
Umur : 43
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Desa

Nama : Rahmat Iskandar
Umur : 42
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan : Sekertaris Desa

Nama : Halik Daud
Umur : 45
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan : Kepala Dusun Walanda

Nama : La Gafur
Umur : 39
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Dusun Langgohe

Masyarakat Setempat

Nama : Wa Api

Umur : 36

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Petani

Nama : La Mbolosi

Umur : 40

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Kuli Bangunan

Nama : Wa Aima

Umur : 39

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nama : La Ima

Umur : 43

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Nama : Wa Ida
Umur : 40
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nama : La Ada Tinggala
Umur : 40
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Nama : LA Ali
Umur : 41
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan

Nama : Wa Mila
Umur : 39
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani

Nama : La Udin

Umur : 20 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Sekolah SMA

Nama : Wa Ilu

Umur : 42 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu RumahTangga

Nama : La Ade

Umur : 36

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Tabel Langkah Pertama (Analisis Data)

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Hasil Dokumentasi	Hasil Observasi	Interprestasi
<p>1. Bagaimana proses pembagian beras raskin di desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah?</p>	<p>Berdasarkan wawancara penelitian dengan bapak MSD (43 tahun) kepala desa walando cara pembagian beras raskin yaitu masyarakat diundang secara langsung dengan cara mengumumkan di masjid bahwa ada pembagian beras raskin, setelah itu dirapatkan di kantor balai desa walando bersama dengan kepala desa, staf pekerja dan masyarakat. Di dalam rapat kepala desa walando menjelaskan kepada kepala keluarga yang berhak menerima beras raskin bahwa setiap satu kepala keluarga mendapatkan 12 liter,</p>	<p>Pelayanan-pelayanan dilakukan di Kantor Balai Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak menggunakan sistem antrian Dibagikan beras raskin seara perdesun Masyarakat menulis nama Berasnya diliter setiap satu liter berharga 2000 rupiah 12 liter saja satu kepala keluarga 	<p>Berdasarkan hasil observasi penelitian bahwa sebelum pelayanan pembagian beras raskin di kantor balai desa walando diadakan rapat, tentang cara pembagian beras yaitu kepala desa membagikan daftar penerimaan beras raskin kepada staf pekerja/ kepala dusun. dusun di desa walando terbagi 5 dusun yaitu <i>Dusun Pimpi, Dusun Walanda, Dusun Tongkoea, Dusun Cihoe, Dusun Watete</i>. Masyarakat setempat membantu kepala dusun untuk</p>	<p>Jadi kesimpulannya adalah bawah di desa walando kecamatan gu kabupaten buton tengah proses pembagian beras raskin yang diperintahkan oleh bapak kepala desa walando sudah dilaksanakan oleh staf pekerja atau kepala dusun untuk melayani masyarakat yang berhak menerima beras raskin sesuai yang diharapkan oleh bapak kepala desa.</p>

	<p>satu liter berharga 2000 rupiah dan dibagi secara perdusun, penerimaan beras setiap satu tahun 4 kali dalam penerimaan beras.</p>		<p>mengangkat karung beras dan membuka karung beras lalu berasnya dihamburkan di tehel dengan membatasi karung-karung yang berisi beras agar berasnya tidak terhambur keman-mana lanjut meliter sesuai yang disuruhkan kepala dusun karena masyarakat mengambil beras dengan keluarganya yang belum sempat hadir karena ada urusan atau nenek/kakeknya yang tidak kuat mengangkat beras tersebut. Kepala dusun menulis nama-nama yang sesuai dusunnya masing-masing, setelah</p>	
--	--	--	--	--

			itu kepala keluarga yang berhak menerima uang sebesar 24.000 karena satu liter berharga 2000 rupiah.	
2. Bagaimana bentuk diskriminasi pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah?	Berdasarkan wawancara penelitian dengan bapak RI (42 tahun) sekertaris kepala desa walando tentang bentuk diskriminasi pembagian beras raskin yaiBentuk diskriminasi pembagian beras raskin yaitu kepala desa mendapatkan beras 15 kilo sedangkan masyarakat 12 liter tanpa ketahuan dari masyarakat, kepala desa tidak membeli beras sedangkan masyarakat membeli beras, staf pekerja mendapatkan	Bentuk diskriminasi pembagian beras raskin yang dilakukan di Kantor Balai Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah antara lain: a. Pendataannya sudah lama b. Kepala keluarga yang sudah mampu tidak boleh menerima beras raskin lagi c. Kecemburuan sosial	Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penelitian di Kantor Balai Desa Walando tempat pembagian beras raskin terjadi diskriminasi yaitu berasnya ada yang bagus dan ada kurang bagus, dikurangi takarangnya yang seharusnya 15 kilo menjadi 12 liter satu Kepala Keluarga, peneliti tidak sengaja menemukan sisa karung beras yang menumpuk di dalam gudang, masyarakat	kesimpulannya adalah di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah terjadi diskriminasi pembagian beras raskin yaitu masyarakat tidak mendapatkan beras yang seharusnya 15 kilo menjadi 12 liter satu kepala keluarga, kepala desa beserta jajarannya seharusnya tidak menerima beras raskin.

	<p>beras 15 kilo perorang sedangkan masyarakat mendapatkan beras dengan cara membeli dan hanya 12 liter saja dan takaran beras yang seharusnya 15 kilo menjadi 12 liter karena banyak masyarakat yang mau ambil beras</p>		<p>yang lupa membawah karung beras disuruh membeli karung beras dengan harga Rp 1000, masyarakat yang tidak datang ambil beras dijual sama masyarakat yang lain tetapi harganya tidak sama dengan masyarakat yang mendapatkan beras harga perliter Rp 4000, ada masyarakat yang mendapatkan beras kurang, lebih dan pas-pasan, dan setelah pembagian beras raskin selesai kepala desa dan staf mengambil bagian beras masing-masing.</p>	
<p>3. Bagaimana kendala</p>	<p>Berdasarkan wawancara penelitian dengan bapak</p>	<p>Adapun kendala dalam</p>	<p>Berdasarkan hasil</p>	<p>Kesimpulannya</p>

<p>pembagian beras raskin di Desa Walando Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah?</p>	<p>RI (42 tahun) sekretaris kepala desa walando bahwa kendala dalam pembagian beras raskin yaitu Kepala keluarga baru yang tidak terdaftar namanya di pendataan meminta diberikan beras karena dalam kebutuhannya sehari-hari kurang mengkonsumsi beras hanya makan jagung atau ubi dan kadang-kadang dalam satu hari itu makan satu kali.</p>	<p>pembagian beras raskin yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat transportasi 2. Melakukan pendataan baru 3. Jarak yang ditempuh cukup lama 4. Jalannya kurang bagus 	<p>observasi yang telah dilakukan peneliti tentang kendala dalam pembagian beras raskin adalah banyak masyarakat yang tidak terdaftar namanya dipendataan ingin mendapatkan beras raskin, sebagian masyarakat tidak dapat menulis namanya karena tidak pernah menginjak bangku sekolah, Kepala Dusun terkendala dalam meliter beras dengan menulis atau mendata nama yang menerima beras raskin karena sebagian masyarakat tidak tau baca dan tulis, ada sebagian tidak pernah datang di Balai</p>	<p>pemerintah yang mendata penerimaan beras raskin harus mendata ulang agar pemerintah di Desa tidak bingung dalam pembagian beras raskin</p>
--	--	---	--	---

			Desa Walando untuk mengambil beras raskin karena ingin membantu neneknya yang tidak kuat lagi untuk mengangkat beras.	
--	--	--	---	--

Langkah ke dua (Trigulasi)

Pertanyaan	MSD	RI	AT	NR	WI
<p>1. Apa tujuan utama pembagian beras raskin?</p>	<p>tujuannya untuk mengurangi pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan mereka, maka diharapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran meningkat serta terlindungi dari rawan pangan dan</p>	<p>Tujuannya adalah memberikan bantuan beras kepada keluarga miskin gizi makro masyarakat guna memenuhi kebutuhan pangan dan pokok, sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan melalui penjualan beras pada tingkat harga besubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.</p>	<p>Dengan adanya beras ini saya bisa memberikan makan keluarga saya.</p>	<p>Menurut saya tujuan utama dalam pembagian beras raskin adalah untuk membantu masyarakat dalam kebutuhan pokoknya, untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, beras raskin saat membantu masyarakat miskin.</p>	<p>Dengan adanya beras yang saya terima ini bisa membantu keluarga yang untuk</p>

<p>2. Apakah dengan adanya beras raskin mampu mengurangi kemiskinan?</p>	<p>kekurangan nutrisi khususnya karbohidrat.</p> <p>Tidak karena beras raskin hanya membantu kebutuhan pokoknya saja masih banyak kebutuhan lain contoh memberikan tempat tinggal untuk keluarganya, mencari uang untuk anak-anaknya sekolah dan memberikan uang jajan untuk anaknya.</p>	<p>Tidak mengurai kemiskinan karena masyarakat tidak hanya butuh makan tapi masih banyak kebutuhan lain.</p>		<p>Menurut saya belum mengurangi kemiskinan karena beras raskin yang diberikan pemerintah hanya kebutuhan makannya saja, masih ada kebutuhan primer lainnya dan kebutuhan sekunder yang harus dicari masyarakat dalam kebutuhan hidupnya.</p>	
--	---	--	--	---	--

<p>3. Bagaimana sistem pembagian beras raskin di Desa Walando?</p>	<p>Sistem pembagian beras raskin yaitu berasnya dibagi perdesun, dusun terbagi menjadi lima Dusun yaitu <i>Dusun Pimpi, Dusun Walanda, Dusun Tongkoea, Dusun Cihoe, Dusun Watete.</i> Setelah itu masyarakat mencari kepala dusunnya masing-masing untuk di bagikan beras.</p>	<p>Sistem pembagiannya itu masyarakat mencari kepala dusunnya untuk dibagikan beras lalu masyarakat menulis namanya dikepala dusunnya masing-masing dan beras dibagi dengan cara diliter.</p>	<p>Sistem pembagian beras yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencari kepala Dusun Mecatat nama saya Memberikan karung beras Diliterkan sebanyak 12 liter Memberikan uang kepada kepala dusun 24.000. 	<p>Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti tentang sistem pembagian beras raskin yang dilakukan di Desa Walando adalah Kepala Desa membagikan angket kepada kepala dusun untuk di isi nama-nama yang mengambil beras, karung yang berisi beras di bentuk lingkaran lalu beras dihambur di dalam lingkaran karung beras, masyarakat membantu Kepala Desa untuk meliterkan beras dan tidak menggunakan</p>	
--	--	---	---	--	--

<p>4. Apa yang menjadi kendala pemerintah setempat dalam pembagian beras raskin di Desa Walando?</p>		<p>Kedalanya adalah dalam pendatan karena pendataannya sudah lama untuk itu harus melakukan pendataan baru, kepala keluarga baru yang tidak ada namanya dipendataan, terkendala akutan ditraspotasi pengangkut beras terlalu lama karena harus melewati laut</p>		<p>sistem antrian.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti tentang kendala dalam pendataan, jarak yang ditempuh dari Kota ke Desa cukup jauh dan ada sebagian masyarakat yang tidak terdaftar namanya ingin mendapatkan beras.</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>5. Berapa kali dalam setahun pembagian beras raskin di Desa Walando?</p> <p>6. Berapa jumlah penduduk di Desa Walando?</p> <p>7. Siapakah yang berhak menerima beras raski?</p>	<p>pembagiannya itu 4 kali dalam setahun.</p> <p>yang berhak menerima beras raski adalah kepala keluarga yang kurang mampu, yang terdaftar namanya dipendataan dan masyarakat yang kurang mampu.</p>	<p>dengan kapal veri, dan jalannya masih dalam perbaikan.</p> <p>Pembagian beras raskin 4 kali dalam setahun.</p> <p>Jumlah penduduk di Desa Walando 300 kepala keluarga.</p>		<p>Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti tentang siapakah yang berhak menerima beras raskin yaitu kepala keluarga yang kurang mampu.</p>	
--	--	---	--	--	--

<p>8. Berapa harga beras raskin di Desa Walando?</p> <p>9. Berapakah kepala keluarga yang terdaftar dalam pendataan?</p> <p>10. Apakah anda tahu apa itu diskriminasi?</p> <p>11. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap diskriminasi pembagian beras raskin?</p>		<p>Harga beras 2000 satu liter.</p> <p>Yang masuk dalam pendataan ada 52 kepala keluarga.</p>	<p>Harganya 2000 rupiah.</p> <p>Saya tidak tau apa itu diskriminasi.</p> <p>Saya tidak setuju dengan adanya diskriminasi karena sangat merugikan masyarakat yang hanya dapat beras sesuai dengan yang ditentukan dirapat.</p>	<p>Kesimpulannya</p>	<p>Saya tidak tau.</p> <p>Saya tidak tahu apa itu diskriminasi setelah anda jelaskan apa itu diskriminasi saya tidak setuju dengan adanya diskriminasi Karena sangat merugikan masyarakat miskin seperti kami.</p>
---	--	---	---	----------------------	--

<p>12. Apa harapan masyarakat kepada pemerintah setempat sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi pembagian beras raskin di Desa Walando?</p>			<p>Harapan saya terhadap pemerintah adalah seharusnya pemerintah harus menjelaskan secara detail tentang pembagian beras raskin supaya tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dan terbuka.</p>	<p>menurut peneliti kiranya pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi pembagian beras raskin di desa walando, dalam hal ini pemerintah desa harus lebih teliti dalam pendataan kepala keluarga yang membutuhkan, yang kurang membutuhkan beras raskin dan tidak membutuhkan beras.</p>	<p>Harapan saya terhadap pemerintah yaitu seharusnya pemerintah harus jujur kepada masyarakatnya agar kedepan tidak ada lagi yang namanya disriminasi karena nantinya masyarakat tidak merasakan kecemburuan sosial terhadap masyarakat yang mempunyai jatah yang lebih dengan yang pas-pas 12 liter.</p>
---	--	--	--	--	---

--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

Konsep Kegiatan Penelitian

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Senin, 16 Oktober 2017	Pengantar permohonan surat izin penelitian	
2.	Selasa, 17 Oktober 2017	Observasi di balai desa walando	
3.	Kamis, 19 Oktober 2017	Observasi di masyarakat desa walando	
4.	Jumat, 20 Oktober 2017	Wawancara dengan masyarakat yang menerima raskin	
5.	Senin, 23 Oktober 2017	Wawancara dengan staf pekerja di balai desa walando	
6.	Rabu, 25 Oktober 2017	Wawancara dengan kepala desa walando	
7.	kamis, 02 November 2017	Dokumentasi	
8.	Selasa, 07 November 2017	Dokumentasi	
9.	Senin, 13 November 2017	Pengambilan surat pernyataan penelitian	

Buton Tengah, 13 November 2017

Mengetahui Kepala Desa Walando

(Mursidi S.Pd.)

Catatan

1. Penelitian dianggap sah setelah melaksanakan ujian proposal
2. Penelitian dilaksanakan minimal 2 bulan
3. Surat ini dianggap sah setelah ada paraf dari prodi



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
KECAMATAN GU
DESA WALANDO**

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NOMOR : 421/160/DS. WLDO/ 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Walando, Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **NORMA**
Nim : 10538278613
Universitas : Muhammadiyah Makassar
Program Study : Pendidikan Sosiologi
Alamat : Jln. Sultan Alauddin, No. 259, Makassar

Benar telah mengadakan Penelitian/ Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : **Diskriminasi Sistem Pembagian Beras Raskin di Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walando, 19 Desember 2017

Kepala Desa Walando

MURSIDI, S.Pd

Gambar-Gambar Hasil Observasi

Gambar depan Kantor Balai Desa Walando.



Sumber: Uswatun Hasana 17/10/2017.

Suasana halaman depan Kantor Balai Desa Walando.



Sumber: Suharni 17/10/2017.

Masyarakat mendaftarkan nama dulu sebelum ambil beras



Sumber: Uswatun Hasana 20/10/2017.

Masyarakat membantu Kepala Dusun Meliter Beras.



Sumber: Uswatun Hasana 20/10/2017.

Wawancara dengan Sekertaris Kepala Desa Walando.



Sumber: Arman 23/10/2017.

Membagikan angket kepada masyarakat Desa Walando.



Sumber: Uswatun Hasana 20/10/2017.

Wawancara dengan masyarakat yang menerima beras raskin.



Sumber: Uswatun Hasana 20/10/2017.

Wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima beras raskin.



Sumber: Uswatun Hasana 20/10/2017.

Beras raskin yang diterima masyarakat Desa Walando.



Sumber: Uswatun Hasana 20/10/2017.

Perbedaan masyarakat yang menerima beras raskin.



Sumber: Uswatun Hasana 20/10/2017.

Riwayat hidup



Norma di kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah tanggal 24 Juni 1995. Anak kedua dari enam bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dan pasangan La Duma dan Wa Nihamu. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD 3 Lombe tahun 2001 sampai tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTS. Negeri 4 Buteng dan tamat pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMA. Negeri 1 Gu dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis berhasil lulus pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1 kependidikan).